SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 118 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;

c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan
f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
    a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
    c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;
(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.

(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 118

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Pemerintah
Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG

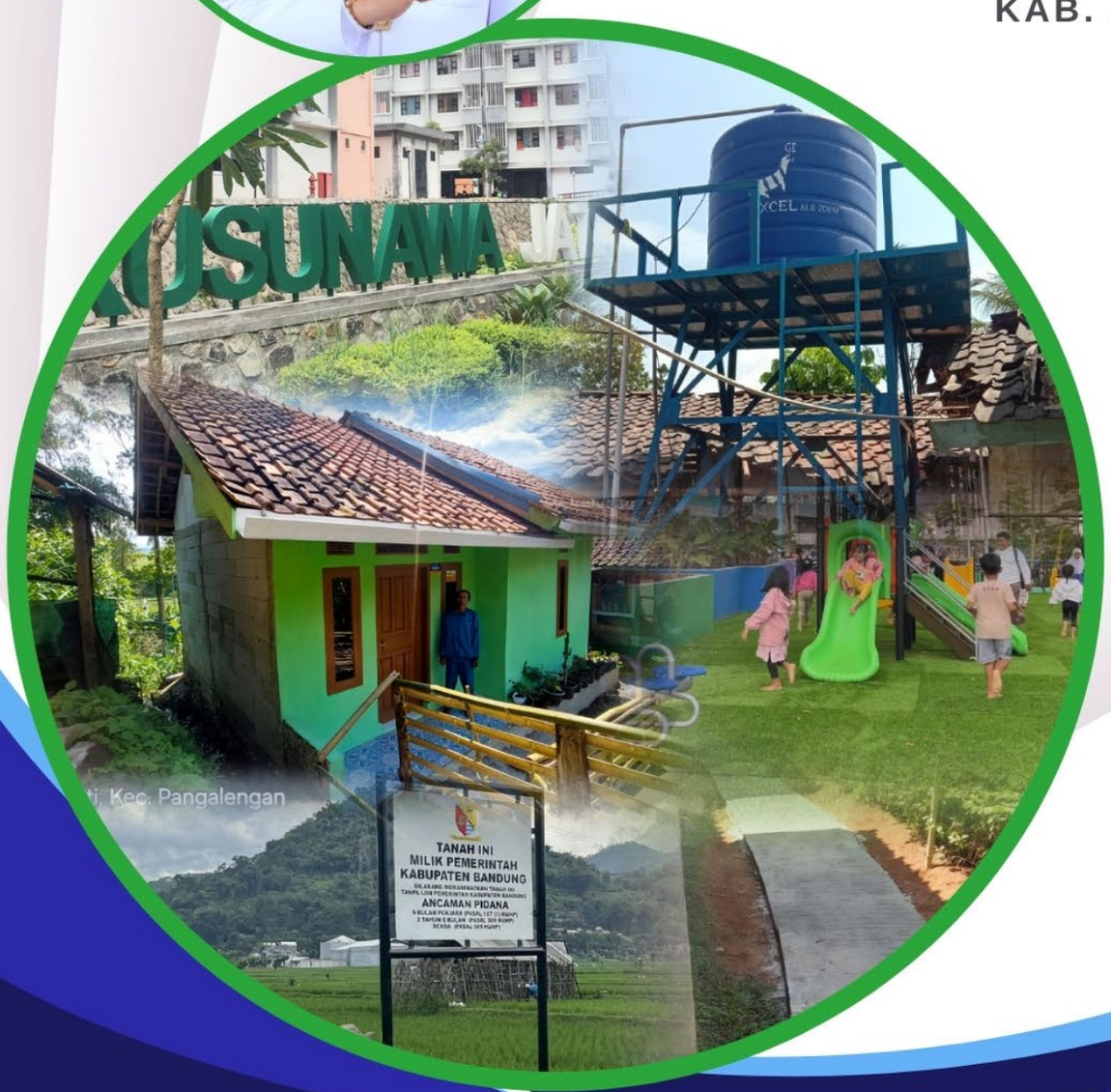
PERATURAN



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DISPERKIMTAN
KAB. BANDUNG



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbilalamin,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki posisi strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, karena menjadi masa peralihan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya menuju penyusunan dan implementasi RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, dokumen perubahan Renja ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan terbaru, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang selaras dengan prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Perubahan Renja ini juga mencerminkan kebutuhan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan dinamika regulasi, evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, serta hasil forum-forum perencanaan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini dapat menjadi panduan yang operasional dan adaptif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Soreang, 20 Juni 2025

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bandung

WAHYUDIN, ST., ME.
NIP. 19680608 199703 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5
BAB II EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 6
2.1 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 6
2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI 7
2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 10
2.4 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 20
2.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN KINERJA 24
2.6 EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 28
2.7 EVALUASI PENANGANAN STUNTING 29
2.8 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 31
2.9 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 60
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 60
3.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 60
3.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 61
3.1.3 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 62
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 63
3.3 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN 66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 82
BAB V PENUTUP 91

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Capaian IKU Disperkimtan Sampai Triwulan I Tahun 2025 7
Tabel II.2 Capaian IKK Sasaran Sampai Triwulan I Tahun 2025 8
Tabel II.3 Capaian IKK Program Sampai Triwulan I Tahun 2025 9
Tabel II.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sampai Triwulan I Tahun 2025 11
Tabel II.5 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disperkimtan dan Pencapaian Renstra Disperkimtan sampai dengan Tahun 2025 13
Tabel II.6 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024 22
Tabel II.7 Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Kinerja 25
Tabel II.8 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung 27
Tabel II.9 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 28
Tabel II.10 Desa Lokus Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2024 29
Tabel II.11 Evaluasi Penanganan Stunting Tahun 2024 Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 31
Tabel II.12 (T-C.31) Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 33
Tabel II.13 Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan 38
Tabel II.14 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung 39
Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029. 61
Tabel III.2 Cascading Misi Pembangunan Keempat 63
Tabel III.3 Tujuan, Sasaran, dan Target Disperkimtan Tahun 2025 65
Tabel III.4 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025 67
Tabel III.5 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 79
Tabel IV.1 (T-C.41) Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 84

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Salah satu instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renja Perangkat Daerah disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Renja Disperkimtan Tahun 2025 semula disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tahun keempat Renstra Disperkimtan 2021–2026. Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika penyusunan dokumen perencanaan baru, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Renja melalui penyusunan *Perubahan Renja Disperkimtan Tahun 2025*.

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh posisi strategis Tahun 2025 sebagai masa transisi menuju periode perencanaan jangka menengah yang baru, yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Sejumlah kebijakan nasional dan regulasi terbaru, termasuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025, mendorong dilakukannya penyesuaian substansi Renja agar tetap relevan dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta target pembangunan jangka menengah daerah yang sedang disusun.

Dalam proses perubahan ini, dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap target kinerja, indikator, serta program dan kegiatan, baik dari aspek substansi maupun teknis perencanaan. Penyesuaian juga mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, dinamika kebutuhan aktual pelayanan publik, serta usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dihimpun melalui berbagai forum partisipatif. Dengan demikian, dokumen perubahan Renja tidak hanya menjadi tindak lanjut administratif,

tetapi juga cerminan dari adaptabilitas perencanaan terhadap kebutuhan pembangunan yang dinamis.

Proses penyusunan Perubahan Renja dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal perubahan, pelaksanaan forum lintas perangkat daerah, hingga penetapan rancangan akhir perubahan. Seluruh proses ini dilakukan dengan menjunjung prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta mengacu pada arah kebijakan dan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

Dengan disusunnya *Perubahan Renja Disperkimtan Tahun 2025*, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah, terukur, serta mampu menjawab tantangan transisi perencanaan yang sedang berlangsung, sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berujung pada penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Disperkimtan Tahun 2025 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahunn 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 75).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Disperkimtan Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan dengan perkembangan kebijakan, regulasi, dan kebutuhan aktual pembangunan, khususnya dalam menghadapi masa transisi menuju dokumen perencanaan jangka menengah baru, yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Perubahan ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tahun berjalan tetap selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Tujuan dari disusunnya dokumen *Perubahan Renja Disperkimtan Tahun 2025* adalah sebagai berikut:

- Menyesuaikan program, kegiatan, sub kegiatan, target, dan indikator kinerja Disperkimtan dengan arah kebijakan pembangunan terbaru dan pedoman perencanaan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
- Menyediakan dokumen perubahan yang menjadi acuan dalam penyusunan *Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)* serta sebagai dasar penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan, serta memastikan kesinambungan kinerja Disperkimtan di tengah dinamika perencanaan dan proses transisi dokumen perencanaan jangka menengah.
- Memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Disperkimtan tetap terarah, terukur, serta adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Disperkimtan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja, serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bagian ini berisi uraian mengenai pelaksanaan renja sampai dengan triwulan I tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bab ini memuat tentang perubahan rencana kerja dan pendanaan Disperkimtan dengan berpedoman pada Renstra Disperkimtan, sasaran RKPD, serta capaian kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Bandung

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan catatan penting dalam penyusunan Renja, kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung telah menetapkan tujuan strategis dala Renstra 2025 – 2029, yaitu:

"Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah"

Tujuan ini diukur menggunakan indikator tujuan atau disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya IKU, setiap Perangkat Daerah dapat mengukur sejauh mana capaian kinerja yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk merencanakan kinerja maupun untuk meningkatkan kualitas kinerja. IKU Disperkimtan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
2. Indeks tertib administrasi pertanahan

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan berada di angka 52,28%. Target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 52,40% bersifat realistis dan mempertimbangkan keterbatasan fiscal serta keterpaduan program lintas sektor. Realisasi pada triwulan I ini masih *on the track* dimana kesenjangan antara capaian dan target cukup kecil. Dengan penguatan intervensi melalui program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta integrase pendanaan pusat dan daerah, target tahun 2025 diperkirakan dapat tercapai dengan baik.

Indikator kedua adalah Indeks tertib administrasi pertanahan. Indeks ini mengukur tingkat keteraturan dan kepastian administrasi pertanahan yang menjadi dasar bagi tata kelola pemanfaatan ruang dan keadilan penguasaan tanah. Capaian pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 34,16 poin sementara target tahun 2025 adalah sebesar 34.58 poin. Kenaikan sebesar 0,42 poin untuk mencapai target tahun 2025 dinilai masih *on the track*.

Tabel II.1 Capaian IKU Disperkimtan Sampai Triwulan I Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2025	Realisasi sd Triwulan I 2025	Tingkat Capaian	Ket
Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	52,4	52,28	99,77%	On the track
	Indeks tertib administrasi pertanahan	34,58	34,16	98,79%	On the track

Sumber : Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025

Secara umum, evaluasi terhadap kedua IKU menunjukkan pada capaian di Triwulan I Tahun 2025 telah berada pada jalur yang sesuai (*on the track*) menuju target tahun 2025. Meskipun laju peningkatan relative moderat, konsistensi intervensi program, kolaborasi antar Perangkat Daerah, serta adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan aktual diyakini mampu mendorong pencapaian target secara optimal. Oleh karena itu, dokumen perubahan Renja ini menjadi penting untuk memastikan bahwa strategi, kegiatan, dan penganggaran tahun 2025 dapat secara efektif mendukung pencapaian target indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang baru.

2.2 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama untuk menilai efektivitas pelaksanaan sasaran strategis dan program prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Evaluasi terhadap IKK menjadi penting dalam konteks Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian arah kebijakan, penguatan akuntabilitas, dan pencapaian hasil pembangunan yang terukur.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Disperkimtan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran strategis pembangunan jangka menengan Disperkimtan antara lain:

1. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau
2. Mengurangi luas kawasan kumuh
3. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar
4. Menciptakan pengelolaan tanah yang optimal, tertata, dan berkeadilan

Secara umum, dari keempat indikator sasaran, hanya satu yang menunjukkan kinerja on the track, sedangkan tiga lainnya masih perlu percepatan agar target tahunan dapat dicapai secara optimal. Meskipun beberapa indikator menunjukkan capaian awal yang belum optimal, tren kinerja hingga Triwulan I menunjukkan bahwa seluruh target masih sangat mungkin untuk tercapai tanpa memerlukan revisi target tahunan.

Tabel II.2 Capaian IKK Sasaran Sampai Triwulan I Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target 2025	Realisasi sd Triwulan I 2025	Tingkat Capaian	Ket
Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	67,92	60,67	89,33%	Perlu percepatan
Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,12	0,14	85,71%	Perlu percepatan
Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	23	21,58	93,83%	On the track
Menciptakan pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan	Persentase bidang tanah Pemda yang telah terkelola	33,55	23,96	71,42%	Perlu percepatan

Sumber : Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025

Evaluasi capaian indikator sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan kondisi sebagai berikut:

1. Sasaran “Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau”

   Diukur melalui indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni, capaian hingga Triwulan I sebesar 60,67% dari target 2025 sebesar 67,92% (89,33%). Kinerja ini termasuk dalam kategori perlu percepatan, namun realisasi awal menunjukkan tren yang positif dan masih dalam batas wajar untuk dapat memenuhi target pada akhir tahun. Perlu digarisbawahi bahwa indikator ini mengalami revisi basis data dan definisi operasional akibat penyesuaian dengan kebijakan provinsi.

2. Sasaran “Mengurangi luas kawasan kumuh”

   Diukur melalui indikator persentase lingkungan permukiman kumuh, capaian Triwulan I sebesar 0,14%, sementara target 2025 adalah 0,12%. Meskipun secara presentase tampak kecil, indikator ini bersifat negatif, sehingga semakin rendah nilainya semakin

baik. Dengan realisasi saat ini, diperlukan percepatan intervensi, namun target tetap dapat dikejar dalam sisa waktu tahun berjalan.

3. Sasaran "Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar"

   Diukur melalui indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Capaian Triwulan I adalah 21,58% dari target 23% (93,83%), dan masuk kategori *on the track*. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan fisik telah menunjukkan progres positif, dan pencapaian target akhir tahun sangat mungkin terealisasi sesuai rencana.

4. Sasaran "Menciptakan pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan"

   Diukur melalui indikator persentase bidang tanah Pemda yang telah terkelola, capaian Triwulan I adalah 23,96% dari target 33,55% (71,42%). Kinerja ini masih dalam kategori perlu percepatan, khususnya terkait proses legalisasi dan pemanfaatan aset tanah Pemda, namun memiliki peluang besar untuk mencapai target akhir tahun apabila didukung dengan penguatan kolaborasi antar perangkat daerah.

Tabel II.3 Capaian IKK Program Sampai Triwulan I Tahun 2025

No	Program	Indikator	Target Murni 2025	Target Perubahan 2025	Realisasi TW I 2025	Tingkat Capaian (%)	Kategori Evaluasi	Keterangan Perubahan
1	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	0,1	0,12	0,14	85,71%	**Perlu Percepatan**	Updating data kondisi lapangan menunjukkan hasil lebih cepat tercapai
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan jumlah rumah layak huni	100	67,92	60,67	89,32%	**Perlu Percepatan**	Perubahan definisi operasional dan data mandatory dari Provinsi
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase prioritas rumah tidak layak huni	100	95,53	91,77	96,06%	**On the Track**	Penyesuaian data berbasis hasil verifikasi lapangan dan usulan baru
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Persentase kawasan yang telah terfasilitasi PSU	23	23	21,23	92,30%	**On the Track**	Tidak ada perubahan; masih dalam lintasan pencapaian

No	Program	Indikator	Target Murni 2025	Target Perubahan 2025	Realisasi TW I 2025	Tingkat Capaian (%)	Kategori Evaluasi	Keterangan Perubahan
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase jumlah penyelesaian sengketa tanah	75	42	33	78,57%	**Perlu Percepatan**	Penyesuaian target berdasarkan kondisi triwulan I dan progres lapangan
6	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	Persentase akses kepemilikan tanah oleh masyarakat (petani)	20	13,89	13,89	100%	**On the Track**	Target telah disesuaikan dengan estimasi kemampuan realisasi aktual
7	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Bidang Tanah Pemda yang Dimanfaatkan	20	21,67	21,67	100%	**On the Track**	Updating data dan optimalisasi pemanfaatan sesuai hasil evaluasi awal
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	84	84,3	84	99,64%	**On the Track**	Penyesuaian target diselaraskan dengan realisasi awal dan akurasi data

Sumber : Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025

2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja pada masing – masing program dan kegiatan dinas. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Renja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Data yang dianalisis dalam evaluasi ini merupakan data yang sudah dilaporkan pada aplikasi Sidalmonep Kabupaten Bandung.

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung secara umum masih berada pada kategori sangat rendah. Terdapat delapan program dan enam belas kegiatan yang diukur pada periode ini, dengan capaian kinerja program secara rata-rata hanya mencapai 14,75%, sedangkan capaian realisasi anggaran baru mencapai 3,47%. Rendahnya capaian tersebut bukan disebabkan oleh kendala pelaksanaan di lapangan, melainkan karena sebagian besar program dan kegiatan masih berada dalam tahapan awal,

seperti persiapan administrasi, reviu dokumen perencanaan, proses pengadaan barang/jasa, serta penyesuaian teknis pelaksanaan dengan arah kebijakan tahun berjalan.

Selain itu, pola pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah ini cenderung berbasis fisik dan kontraktual, sehingga serapan anggaran maupun capaian output baru akan terlihat signifikan mulai Triwulan II dan III, ketika pelaksanaan pekerjaan fisik telah memasuki tahap eksekusi. Kendati demikian, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, agar tidak menimbulkan akumulasi beban pelaksanaan di akhir tahun yang berisiko terhadap kualitas kinerja. Diperlukan penguatan pengendalian internal, peningkatan koordinasi antara perencana, PPTK, dan PPK, serta pelaksanaan monitoring mingguan untuk memastikan keberlanjutan proses kegiatan sejak dini. Dengan capaian indikator kinerja utama yang telah menunjukkan tren on track pada triwulan ini, maka percepatan realisasi program dan kegiatan mutlak diperlukan agar tidak terjadi deviasi kinerja pada periode berikutnya.

Secara lebih lengkap, capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sampai Triwulan I Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Predikat Capaian Kinerja	Predikat Realisasi Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**24,66%**	**24,81%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10,63%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,50%	15,21%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,00%	20,91%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,44%	3,80%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	28,31%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	**0,07%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	2,39%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	7,82%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	0,07%	Sangat Rendah	Sangat Rendah

PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Predikat Capaian Kinerja	Predikat Realisasi Anggaran
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**4,83%**	**6,46%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	9,67%	6,83%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**-**	**0,07%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**0,07%**	Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**-**	**0,36%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	0,36%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**-**	**2,89%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	2,89%	Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**-**	**7,60%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**7,60%**	Sangat Rendah	Sangat Rendah
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**-**	**0,05%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**0,05%**	Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata - rata Capaian Kinerja Program	**14,75%**	**3,47%**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Disperkimtan Kabupaten Bandung sampai dengan Triwulan I dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel T-C.29 di bawah ini.

Tabel II.5 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disperkimtan dan Pencapaian Renstra Disperkimtan sampai dengan Tahun 2025

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
`	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04 . 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI KANTOR**	**416,60**	**166,10**	**83,25**	**84,00**	**101%**	**83,50**	**333,60**	**80,08%**
1.04 . 01 . 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**500,00**	**200,00**	**100,00**	**50,00**	**50%**	**100,00**	**350,00**	**70%**
1.04 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	4	2	2	100%	2	8	80%
1.04 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,00	4	2	1	50%	2	7	70%
1.04 . 01 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10,00	4	2	1	50%	2	7	70%
1.04 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00	4	2	1	50%	2	7	70%
1.04 . 01 . 2.01 . 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4,00	0	0	0	0%	2	2	50%
1.04 . 01 . 2.01 . 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10,00	0	0	0	0%	5	5	50%
1.04 . 01 . 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**500**	**200**	**100**	**100,00**	**100%**	**100**	**400**	**80%**
1.04 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	391	154	79	79	100%	77	310	79%
1.04 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**500**	**200**	**100**	**33,33**	**33%**	**100**	**333,33**	**67%**
1.04 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5	2	1	1	100%	1	4	80%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Disediakan								
1.04 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	2	1	1	100%	1	4	80%
1.04 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	2	1	1	100%	1	4	80%
1.04 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	2	1	1	100%	1	4	80%
1.04 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	16	8	4	50%	8	28	70%
1.04 . 01 . 2.06 . 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25	10	5	2	40%	5	17	68%
1.04 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	40	20	0	0%	20	60	60%
1.04 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	100	50	20	40%	50	170	68%
1.04 . 01 . 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**200**	**100**	**50,00**	**50%**	**100**	**350**	**70%**
1.04 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	6	50%	12	42	70%
1.04 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	12	6	50%	12	42	70%
1.04 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**500**	**200**	**100**	**25,00**	**25%**	**100**	**325**	**65%**
1.04 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	420	168	84	20	24%	84	272	65%
1.04 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	14	7	3	43%	7	24	69%
1.04 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	2	1	0	0%	1	3	60%
1.04 . 01 . 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**500**	**200**	**100**	**-**	**0%**	**100**	**300**	**60%**
1.04 . 01 . 2.11 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	4	2	0	0%	2	6	100%
1.04 . 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG**	**491,81**	**193,63**	**98,18**	**26,85**	**27%**	**100**	**320,48**	**65%**
1.04 . 02 . 2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program**	**500**	**200**	**100**	**-**	**0%**	**100**	**300**	**60%**
1.04 . 02 . 2.03 . 0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yangTerbangun	9	6	3	0	0%	0	6	67%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.04 . 02 . 2.03 . 0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6	0	0	0	0%	3	3	50%
1.04 . 02 . 2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni**	**500**	**200**	**100**	**25,00**	**25%**	**100**	**325**	**65%**
1.04 . 02 . 2.05 . 0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	15	6	3	1	33%	3	10	67%
1.04 . 02 . 2.05 . 0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5	2	1	0	0%	1	3	60%
1.04 . 02 . 2.05 . 0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 02 . 2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan** **B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan**	**500**	**200**	**100**	**55,56**	**56%**	**100**	**355,56**	**71%**
1.04 . 02 . 2.06 . 0002	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	24	16	8	4	50%	0	20	83%
1.04 . 02 . 2.06 . 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	2	1	1	100%	1	4	80%
1.04 . 02 . 2.06 . 0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	2	0	0	0	0%	1	1	50%
1.04 . 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH**	**0,56**	**0,42**	**0,14**	**0,18**	**78%**	**0,19**	**0,79**	**24%**
		PERSENTASE SISA LUAS KAWASAN KUMUH	**0,16**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0,1**	**0,1**	**63%**
1.04 . 03 . 2.02	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**500**	**200**	**100**	**-**	**0%**	**100**	**300**	**60%**
1.04 . 03 . 2.01 . 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	2	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 03 . 2.01 . 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 03 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	0	0	0	0%	0	0	0%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.04 . 03 . 2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**500**	**200**	**100**	**33,33**	**33%**	**100**	**333,33**	**67%**
1.04 . 03 . 2.02 . 0002	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	5	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 03 . 2.02 . 0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2	1	1	1	100%	0	2	100%
1.04 . 03 . 2.02 . 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	75	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 03 . 2.02 . 0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	13	3	3	3	100%	5	11	85%
1.04 . 03 . 2.02 . 0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	30	20	10	0	0%	10	30	100%
1.04 . 03 . 2.02 . 0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	4	2	1	1	100%	1	4	100%
1.04 . 03 . 2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase luas kawasan kumuh**	**500**	**200**	**100**	**10,05**	**10%**	**100**	**310,05**	**62%**
1.04 . 03 . 2.03 . 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 03 . 2.03 . 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan RumahTidak Layak Huni Beserta PSU	10	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 03 . 2.03 . 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	800	400	200	16	0%	200	616	77%
1.04 . 03 . 2.03 . 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	7	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 03 . 2.03 . 0007	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	21	7	7	3	43%	7	17	81%
1.04 . 03 . 2.03 . 0009	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	8	4	2	2	100%	2	8	100%
1.04 . 04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**	**447,03**	**156,35**	**90,68**	**49,75**	**55%**	**100**	**306,10**	**68%**
1.04 . 04 . 2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan**	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang**	**500**	**200**	**100**	**49,75**	**50%**	**100**	**349,75**	**70%**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**terbangun hasil kesepakatan**								
1.04 . 04 . 2.01 . 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	5250	1000	1218	606,00	50%	1750	3356	64%
1.04 . 04 . 2.01 . 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 04 . 2.01 . 04	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumu	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 04 . 2.01 . 07	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 04 . 2.01 . 09	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1.04 . 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU**	**105**	**36**	**21**	**21,19**	**101%**	**23**	**80,19**	**76%**
1.04 . 05 . 2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU**	**500**	**200**	**100**	**21,19**	**21%**	**100**	**321,19**	**64%**
1.04 . 05 . 2.01 . 01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	8	4	2	2	100%	2	8	100%
1.04 . 05 . 2.01 . 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	240	90	294	56	19%	50	196	82%
1.04 . 05 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman	16	8	4	2	50%	4	14	88%
1.04 . 05 . 2.01 . 0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	72	48	0	0	0%	24	72	100%
1.04 . 05 . 2.01 . 0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan	72	48	0	0	0%	24	72	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perbaikan								
1.04 . 05 . 2.01 . 0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	141	0	0	0	0%	47	47	33%
1.04 . 05 . 2.01 . 0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	72	0	0	0	0%	24	24	33%
1.04 . 05 . 2.01 . 0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	16	8	4	2	50%	4	14	88%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2.10 . 04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**	**175**	**100**	**75**	**28,57**	**38%**	**0**	**128,57**	**73%**
		PERSENTASE PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**150**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**75**	**75,00**	**50%**
2.10 . 04 . 2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi**	**500**	**200**	**100**	**28,57**	**29%**	**100**	**328,57**	**66%**
2.10 . 04 . 2.01 . 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara -dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Bidang Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	10	4	2	1	50%	2	7	70%
2.10 . 04 . 2.01 . 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25	10	5	1	20%	5	16	64%
02:10:05	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN**	**100**	**40**	**20**	**-**	**0%**	**20**	**60**	**60%**
2.10 . 10 . 2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform**	**500**	**200**	**100**	**-**	**0%**	**100**	**300**	**60%**
2.10 . 10 . 2.01 . 04	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu)	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu)	1	1	1	0	0%	0	1	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sd. Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d bulan Juni Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota								
2.10 . 10 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	2	1	0	0%	1	3	75%
02:10:09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG BERSERTIFIKAT**	**62,34**	**23,25**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**23,25**	**37%**
2.10 . 09 . 2.01	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Terselesaikan Persentase izin membuka tanah yang dikeluarkan**	**100**	**23,25**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**23,25**	**23%**
2.10 . 09 . 2.01 . 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	400	93	0	0	0%	0	93	23%
2.10 . 10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA**	**94**	**33**	**19**	**28,57**	**150%**	**20**	**81,57**	**87%**
2.10 . 10 . 2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun**	**500**	**200**	**100**	**28,57**	**29%**	**100**	**328,57**	**66%**
2.10 . 10 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	5	1	6	2	33%	1	4	80%
2.10 . 10 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	1	1	0	0%	1	2	40%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

2.4 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka peningkatan infrastruktur penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni serta pemenuhan infrastruktur pendukung didalamnya. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai dengan 2024 yang berhasil mewujudkan sebanyak 582.735 rumah layak huni. Penanganan rumah tidak layak huni sudah efektif dalam memberikan rumah yang layak bagi penghuninya dimana target penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 39.515 unit rumah selama 5 tahun sehingga setiap tahun target penanganannya sebanyak 3.500 unit rumah. Pada tahun 2023, perbaikan rumah tidak layak huni dilakukan sebanyak 7.506 unit. Sehingga, pada akhir tahun 2023 sisa rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 16.009 unit. Jika ditinjau secara kualitas, kualitas rumah yang telah diperbaiki sudah memenuhi standar rumah layak huni yaitu mencakup syarat keselamatan bangunan, kecukupan luas minimum bangunan, serta kesehatan dan kenyamanan penghuni. Perbaikan rumah tidak layak huni sejauh ini telah berkontribusi terhadap peningkatan kehidupan yang lebih layak khususnya dalam hal memiliki tempat tinggal yang layak huni.

Selain itu, langkah yang diambil untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi angka stunting ialah dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar. Sasaran intervensi kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tinggal di lokasi kawasan kumuh. Upaya perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian menjadi layak, aman, dan nyaman untuk ditinggali sehingga harapannya penduduk di lingkungan tersebut dapat lebih berdaya secara sosial dan ekonominya. Penanganan kawasan permukiman kumuh cukup berhasil pada lokasi yang telah diintervensi melalui program kawasan permukiman dengan pelaksanaan peremajaan pada kawasan kumuh. Selain itu kawasan yang telah diintervensi diserahkan kepada kelompok penerima manfaat yang diharapkan dapat mengelola serta memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan baik.

Hingga tahun 2024, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di Kabupaten Bandung baru mencapai 21,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penyediaan infrastruktur dasar permukiman masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong peningkatan cakupan tersebut, berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain melalui penyediaan PSU baru di kawasan permukiman yang belum terlayani, perbaikan dan pemeliharaan PSU yang telah ada namun belum memenuhi standar teknis, serta percepatan proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah. Serah

terima PSU menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan aset secara legal dan berkelanjutan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengembang terhadap kewajiban penyerahan PSU. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif dalam meningkatkan cakupan dan kualitas PSU, guna menciptakan lingkungan permukiman yang aman, sehat, dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

Adanya sertifikasi terhadap bidang tanah Pemda merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi potensi konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang karena sudah ada legalitas dalam kepemilikan aset. Legalisasi dokumen sertifikat atas nama Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pemanfaatan aset yang akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. Legalitas aset ini tentu akan meningkatkan investasi karena dapat meningkatkan kepercayaan dari investor yang akan mengembangkan dan memanfaatkan aset tersebut. Penggunaan tanah telah secara optimal mampu mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Aset tanah Pemda yang telah memiliki legalitas dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai contohnya, Pemda Kabupaten Bandung telah membebaskan lahan untuk pembangunan rumah sakit, selain itu ada juga aset tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan polder air. Pembangunan ini berdampak pada semakin luasnya cakupan pelayanan publik bagi masyarakat.

Selama ini, penyelesaian sengketa tanah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan untuk aset yang dikuasi oleh pihak lain dan/atau digugat oleh pihak lain. Penyelesaian sengketa harus dilakukan agar aset yang dimiliki oleh Pemda dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Jika terdapat konflik, maka terlebih dahulu dilakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses tersebut tentu menerapkan prinsip hukum dan keadilan sosial karena tujuan akhirnya adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pelaksanaan program ini masih memerlukan peningkatan dikarenakan masih sulitnya dalam mengidentifikasi objek-objek redistribusi tanah.

Tabel II.6 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pendukung	Tantangan Pelaksanaan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Program peningkatan kualitas infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kejadian bencana tidak dapat diprediksi sehingga seringkali terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan pembangunan rumah bagi korban bencana dengan anggaran yang tersedia	• Mengalihkan pembangunan rumah terdampak bencana ke sumber pembiayaan lainnya • Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana
		Program Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung mewujudkan dan menjaga lingkungan hunian yang layak	Melakukan penyadaran publik untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	• Adanya keterbatasan lahan yang akan dihibahkan untuk pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman • Rendahnya tingkat partisipasi (swadaya) masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur terbangun • Belum terinformasikan kewajiban pengembang perumahan untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan • Tumpang tindih kewenangan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan perangkat daerah lain	• Memanfaatkan inovasi sistem informasi geospasial untuk menyeleraskan kegiatan pelaksanaan antarprogram • Mengevaluasi manajemen sumber daya manusia untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dari program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum • Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pengembang dan perangkat desa berdampingan dengan pelaksanaan program prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman • Menginventarisir kewenangan dan ruang lingkup program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman • Melaksanakan evaluasi terkait metode perencanaan untuk setiap jenis prasarana, sarana dan utilitas umum • Membuat persyaratan untuk ketersediaan dan kepemilikan lahan hibah untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam kriteria teknis untuk efektivitas pelaksanaan program
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan	• Banyaknya intervensi dan kepentingan politik dalam penentuan calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni yang kadangkala tidak memenuhi kriteria penerima bantuan • Perbaikan rutilahu merupakan stimulan untuk	Memanfaatkan data P3KE sebagai pertimbangan dalam penentuan sasaran calon penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pendukung	Tantangan Pelaksanaan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
			Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	menyediakan rumah yang layak sehingga tetap membutuhkan keterlibatan dan swadaya masyarakat. Hal tersebut yang seringkali menghambat pembangunan rumah layak huni	
		Program Penatagunaan Tanah	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	• Sulitnya pengadaan jika pemilik lahan belum bersedia melepaskan tanahnya • Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan	• Melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik lahan • Memberikan jaminan perlindungan keamanan bagi pemilik lahan
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Inventarisasi Sengketa, Konflik, Dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	• Perlunya koordinasi dengan instansi terkait dan pihak desa/kecamatan yang menjadi lokasi untuk mengetahui duduk permasalahan potensi konflik • Tanah merupakan objek yang riskan memicu terjadi bentrok kebijakan	Memperkuat kebijakan penataan spasial pada setiap bidang tanah
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penataan Akses Dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Proses identifikasi memerlukan sumber daya yang memiliki kemampuan GIS	• Melakukan identifikasi terhadap potensi - potensi tanah yang bisa dijadikan objek redistribusi tanah • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan syarat administrasi

Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025

2.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN KINERJA

Capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat pembangunan. Identifikasi terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat ini perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja dinas. Faktor mendorong merupakan faktor – faktor yang mampu meningkatkan capaian kinerja dinas baik dari internal maupun eksternal, sementara faktor pendorong merupakan faktor – faktor yang dianggap menjadi kendala dan permasalahan dalam mencapai kinerja dinas. Identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

DISPERKIMTAN

Tabel II.7 Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Rumah, Perumahan, dan Permukiman dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Meningkatnya akses terhadap prasarana sarana dan utilitas umum	Persentase Lingkungan yang didukung oleh PSU yang memadai	• Bertambahnya jumlah perumahan yang telah diserahterimakan ke pemda, infrastruktur perumahan dan permukiman yang dibangun sehingga cakupan layanannya bertambah • Adanya penambahan anggaran dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman baik dari APBD maupun APBD Provinsi • Adanya optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan	• Terbatasnya personil yang melakukan monitoring / pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan • Adanya potensi kesalahan metode geolistik dalam pembangunan sarana air bersih • Belum sepenuhnya terpadu program prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan program kegiatan lainnya
2		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas rumah	Persentase rumah layak huni	• Semakin bertambahnya jumlah anggaran per unit rumah yang disiapkan oleh Pemerintah untuk perbaikan rumah tidak layak huni • Adanya dukungan dana swadaya dari masyarakat untuk perbaikan rumah tidak layak huni	• Kriteria penilaian rumah layak huni semakin kompleks • Jangka waktu untuk intervensi yang cukup panjang sehingga seringkali CPCL yang diusulkan sudah diintervensi melalui program lainnya • Seringkali terjadi perubahan Lembaga penerima bantuan sehingga menghambat proses penyaluran
3		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	• Tersedianya payung hukum penataan kumuh dari level Perda hingga Perbup serta Perbup kolaborasi untuk penataan kumuh • Adanya dukungan program dan kegiatan pada lokus yang sama • Terlibatnya masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan	• Terjadinya kumuh berulang di tempat yang sudah diintervensi • Keterbatasan dalam menyediakan infrastruktur dasar wilayah • Masih adanya ego sectoral bidang atau PD atau pemangku kepentingan lainnya • Data calon rumah yang akan diperbaiki kadang tidak valid dan tidak sesuai dengan kriteria • Luasnya cakupan Kawasan kumuh membutuhkan anggaran yang besar
4		Meningkatnya Tertib	Persentase Tanah	• Tersedianya data kebutuhan untuk	• Harga ganti rugi dengan pemilik lahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Administrasi dan Tata Kelola Pertanahan	Pemda yang telah bersertifiat	pengadaan tanah • Adanya dorongan dari MCP KPK sehingga tercipta kesadaran untuk pengsertifikatan tanah • Sudah adanya tertib administrasi dalam hal inventarisasi asset pertanahan	tinggi • Tidak tertibnya penyewa lahan dalam membayar sewa • Pemenuhan persyaratan yang diminta BPN sebagai syarat diterbitkannya sertifikat masih sulit dipenuhi • Tidak adanya asal usul data kepemilikan tanah • Belum semua instansi melakukan updating asset di KIB (Kartu Inventaris Barang) • Adanya keterlambatan dalam pendaftaran pensertifikatan oleh stakeholder pengguna tanah • Belum ada tanah yang dapat menjadi objek redistribusi tanah • Belum lengkapnya syarat administrasi yang dipenuhi oleh kelompok masyarakat
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja organisasi indikator sakip	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan	Nilai Sakip Disperkimtan	• Adanya komitmen dalam penerapan SAKIP • Adanya perbaikan atas hasil review capaian SAKIP tahun sebelumnya	• Masih kurangnya sosialisasi terkait kebijakan akuntabilitas di Perangkat Daerah • Belum terintegrasinya sistem SAKIP dengan sistem perencanaan dan penganggaran • Masih kurangnya kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja

Tabel II.8 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			60,67	67,92	68,65	69,37	60,67	67,92	68,65	69,37	
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh			0,14	0,12	0,1	0,08	0,14	0,12	0,1	0,08	
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU			21,58	23	25	27	21,23	23	25	27	
4	Persentase bidang tanah Pemda yang telah terkelola			23,96	33,55	44,73	55,91	21,67	33,55	44,73	55,91	

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

2.6 EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

SPM menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar yang mencakup SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah

Pada tahun 2023, alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam menggunakan alokasi anggaran pada belanja Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota. Kebutuhan biaya untuk rehabilitasi 1 unit rumah tidak layak huni adalah Rp 20.000.000,00 sedangkan untuk pembangunan kembali 1 unit rumah tidak layak huni adalah Rp 60.000.000,00. Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.355.000.000,00.

Hasil capaian pelayanan SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam telah tercapai 100% dimana realisasi pelayanan sebesar 34 unit rumah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi 34 unit ini terdiri dari layanan rehabilitasi rumah sebanyak 19 unit dan layanan pembangunan kembali rumah sebanyak 15 unit.

Tabel II.9 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

Sasaran	Jenis pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman (Pemenuhan barang	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang	Jumlah warga negara korban bencana yang	34 unit	34 unit	100 %

Sasaran	Jenis pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Capaian
dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu)	layak huni bagi korban bencana alam	memperoleh rumah layak huni			
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0 unit	0 unit	n/a

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

2.7 EVALUASI PENANGANAN STUNTING

Pada saat ini Kabupaten Bandung telah memiliki Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Regulasi tersebut mengatur sasaran dan kegiatan penurunan stunting, pendekatan yang dilakukan, tata laksana edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi, peran serta stakeholder serta mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan atas upaya pencegahan dan penurunan stunting yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk turut serta berperan aktif dalam mendukung upaya penurunan stunting di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.55/KEP.356-BAPPELITBANGDA/2023 tentang Penetapan Desa Lokus Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2024, terdapat 29 desa yang menjadi lokus penurunan stunting di tahun 2024. Sejak tahun 2020, Disperkimtan telah berkomitmen untuk turut serta menangani stunting di Kabupaten Bandung melalui upaya penyediaan rumah layak huni, penyediaan sanitasi maupun penyediaan air bersih untuk skala perumahan dan permukiman.

Tabel II.10 Desa Lokus Prioritas Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa
1	Arjasari	Pinggirsari
2	Banjaran	Mekarjaya

No	Kecamatan	Desa
3	Banjaran	Banjaran Wetan
4	Banjaran	Ciapus
5	Cicalengka	Nagrog
6	Cicalengka	Panenjoan
7	Cilengkrang	Girimekar
8	Cilengkrang	Jatiendah
9	Ciparay	Sagaracipta
10	Ciparay	Bumiwangi
11	Ciparay	Serangmekar
12	Ciparay	Pakutandang
13	Margaasih	Nanjung
14	Margahayu	Sayati
15	Pacet	Mandalahaji
16	Pacet	Cikawao
17	Pameungpeuk	Rancatungku
18	Pameungpeuk	Sukasari
19	Pameungpeuk	Langonsari
20	Pameungpeuk	Bojongkunci
21	Pangalengan	Lamajang
22	Pangalengan	Banjarsari
23	Pangalengan	Sukamanah
24	Pangalengan	Tribaktimulya
25	Pangalengan	Margamukti
26	Pangalengan	Margamulya
27	Rancabali	Alamendah
28	Rancabali	Cipelah
29	Rancabali	Sukaresmi

Sumber: Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.55/KEP.356-BAPPELITBANGDA/2023

Pada tahun 2024, Disperkimtan mengganggarkan Rp 5.999.357.118 untuk mendukung penanganan stunting yang berasal dari 3 subkegiatan. Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian untuk dalam penanganan sanitasi dan air bersih, Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dalam menangani rumah tidak layak huni, serta Subkegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dalam penanganan sanitasi. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi intervensi penanganan stunting adalah Rp 5.988.030.138 atau sebesar 99,81%. Secara kinerja, seluruh kegiatan stunting telah dilaksanakan 100% namun realisasi anggarannya sebesar 99,81% dikarenakan adanya sisa penawaran pada harga kontrak pekerjaan.

Penanganan sanitasi dilakukan di 12 lokasi yaitu Desa Alamendah, Banjarsari, Bumiwangi, Lamajang, Langonsari, Mandalahaji, Margamukti, Margamulya, Nanjung, Sayati, Sukaresmi, dan Sukamanah. Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan di seluruh lokus stunting dengan total rutilahu terbangun sebanyak 106 unit. Penanganan air bersih dilaksanakan malelui dua sumber pendanaan yaitu APBD dan Bankeu Provinsi Jawa Barat. Terdapat 7

lokasi yang didanai dari APBD yaitu Desa Banjaran Wetan, Jatiendah, Mandalahaji, Nanjung, Pinggirsari, Sayati, dan Sukamanah. Selanjutnya terdapat 9 lokasi yang didanai dari Bankeu Provinsi Jawa Barat yaitu Banjaran Wetan, Bojongkunci, Cikawao, Girimekar, Jatiendah, Nagrog, Panenjoan, Rancatungku, dan Sukasari.

Tabel II.11 Evaluasi Penanganan Stunting Tahun 2024 Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

INDIKATOR	SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Sanitasi	Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum diPerumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp1.509.541.118,00	Rp1.503.942.194,00
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp600.840.000,00	Rp600.031.226,00
Air Bersih	Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum diPerumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp1.768.976.000,00	Rp1.764.056.718,00
Rutilahu	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk PencegahanTerhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp2.120.000.000,00	Rp2.120.000.000,00
	TOTAL	**Rp5.999.357.118,00**	**Rp5.988.030.138,00**

Sumber: Hasil Evaluasi Disperkimtan, 2025

2.8 REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah yang menyebabkan dinamika pembangunan di tahun 2024 sampai 2025, adanya penyusunan RPJMD Tahun 2025 – 2029, adanya kebijakan yang menyebabkan *refocussing* anggaran, maka dilakukan Perubahan RKPD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang signifikan sebagai respons terhadap berbagai penyesuaian fiscal dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan data anggaran, DPA Murni ditetapkan sebesar Rp220.007.773.130,88. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa kali penyesuaian yang berdampak pada struktur dan prioritas belanja daerah.

Penyesuaian pertama dilakukan melalui Parsial 1 dengan pengurangan sebesar Rp812.498.847,00, sehingga anggaran menjadi Rp219.195.274.283,88. Selanjutnya, terdapat penyesuaian berdasarkan Rancangan Awal RKPD-P yang merefocussing anggaran sebesar Rp18.160.484.757,00. Di sisi lain, terdapat penyesuaian untuk kebutuhan gaji dan tunjangan termasuk Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar Rp1.696.379.280,12 dikarenakan adanya penambahan pegawai baru dari jalur CPNS dan PPPK.

Dalam tahapan Rancangan RKPD-P, terdapat dinamika yang cukup seimbang antara penambahan dan pengurangan anggaran. Penambahan sebesar Rp4.521.668.462,00 dibarengi

dengan pengurangan dengan nominal yang sama, sehingga tidak terjadi perubahan pada total anggaran pada tahap ini. Namun, perubahan signifikan terjadi pada tahap Penyesuaian RANHIR RKPD-P. Pada tahap ini, terdapat refocussing anggaran sebesar Rp57.000.000.000,00 yang mengurangi anggaran secara drastis, sementara penambahan belanja hanya sebesar Rp19.648.500.000,00. Akibatnya, total anggaran akhir tersisa sebesar Rp165.379.668.807,00.

Refocussing sebesar Rp57 miliar ini berdampak langsung terhadap turunnya target program prioritas, khususnya Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang awalnya menargetkan 2.260 unit turun drastis menjadi hanya 715 unit. Selain itu, anggaran hasil Musrenbang yang sedianya menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat juga ikut tergerus dalam proses refocussing tersebut.

Sementara itu, penambahan anggaran sebesar Rp19,6 miliar difokuskan pada belanja modal strategis, antara lain untuk pengadaan tanah dan kebutuhan pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri, Penyusunan Dokumen Perencanaan (PH) untuk Kejaksaan, pembangunan RSUD Kertasari, serta proses appraisal dan perencanaan pemanfaatan tanah untuk RSUD tersebut.

Perubahan-perubahan ini menjadi dasar penting dalam penyesuaian Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Selain menyesuaikan target kinerja, juga dilakukan redefinisi prioritas agar tetap relevan dengan kemampuan fiskal yang tersedia dan dinamika kebutuhan strategis daerah.

DISPERKIMTAN

Tabel II.12 (T-C.31) Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025

Kode Rekening					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bandung**	**- NILAI AKIP - NILAI BMD**	**A (83,50)**	**19.611.802.621,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bandung**	**- NILAI AKIP - NILAI BMD**	**A (84,30)**	**22.290.767.311,00**	**PD**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bandung**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100,00%**	**341.104.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bandung**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100,00%**	**295.360.580,00**	**PD**
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	47.151.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	44.141.000,00	PD
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	4.300.000,00	PD
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	13.953.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.010.000,00	PD
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	110.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	106.000.000,00	PD
1	04	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	96.000.000,00	PD
1	04	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5 Data	50.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5 Data	41.909.580,00	PD
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bandung**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**13.843.654.121,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bandung**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**100%**	**15.864.796.801,00**	**PD**
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 orang / bulan	13.843.654.121,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 orang / bulan	15.864.796.801,00	PD
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bandung**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100,00%**	**567.900.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bandung**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**100,00%**	**832.754.240,00**	**PD**
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.998.900,00	PD
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	249.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	235.335.200,00	PD
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.994.900,00	PD
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	61.371.140,00	PD
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	86.200.000,00	PD
1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab.	Jumlah Paket Bahan/Material	5 Paket		Penyediaan Bahan/Material	Kab.	Jumlah Paket Bahan/Material	5 Paket		PD

Kode Rekening					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Bandung	yang Disediakan		10.000.000,00		Bandung	yang Disediakan		308.715.100,00	
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	18.900.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	18.900.000,00	PD
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	102.239.000,00	PD
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bandung**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4.392.519.500,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bandung**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4.840.220.440,00**	**PD**
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.781.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.781.000,00	PD
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.307.738.500,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.755.439.440,00	PD
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bandung**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**100%**	**417.500.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bandung**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**100%**	**408.510.250,00**	**PD**
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 unit	210.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 unit	249.512.250,00	PD
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	157.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	109.000.000,00	PD
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	49.998.000,00	PD
1	**04**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Bandung**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**49.125.000,00**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Bandung**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**49.125.000,00**	**PD**
1	04	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	49.125.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	49.125.000,00	PD
								JUMLAH I	**19.611.802.621,00**					**22.290.767.311,00**	PD
1	**04**	**02**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Kab. Bandung**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**PD**
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Kab. Bandung**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG**	**100,00%**	**1.000.650.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG**	**67,92%**	**2.335.226.681,00**	**PD**
1	**04**	**02**	**2.3**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Kab. Bandung**	**Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program**	**100%**	**235.000.000,00**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program**	**100%**	**1.679.725.000,00**	**PD**
1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Kab. Bandung	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3 Unit Rumah	235.000.000,00	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yangTerbangun	21 Unit Rumah	1.679.725.000,00	PD
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Kab. Bandung**	**Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni**	**100%**	**536.200.000,00**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**		**Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni**	**100%**	**515.204.681,00**	**PD**
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	436.200.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	431.753.500,00	PD
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 dokumen	100.000.000,00	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 dokumen	83.451.181,00	PD

Kode Rekening					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Kab. Bandung**	**A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan**	**100%**	**229.450.000,00**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**		**A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan**	**100%**	**140.297.000,00**	**PD**
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	109.450.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	63.602.000,00	PD
1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Bandung	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Sistem Informasi	120.000.000,00	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi	76.695.000,00	PD
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Kab. Bandung**	**PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**	**100,00**	**57.616.258.513,00**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		**PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**	**95,53%**	**52.524.733.940,00**	**PD**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bandung**	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan**	**100%**	**57.616.258.513,00**	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan**	**100%**	**52.524.733.940,00**	**PD**
1	04	4	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Bandung	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	2260 Unit Rumah	57.616.258.513,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	715 Unit Rumah	52.524.733.940,00	**1. PD : Rp.19.475.230.660,00 2.Pokir : Rp.33.049.503.280,00**
1	**04**	**03**	**2.03**		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Kab. Bandung**	**PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH**	**0,10%**	**11.594.036.100,00**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		**PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH**	**0,12%**	**5.873.708.400,00**	**PD**
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Kab. Bandung**	**Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**100%**	**684.350.000,00**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**100%**	**784.349.100,00**	**PD**
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	5 Dokumen	500.000.000,00	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	5 Dokumen	550.000.000,00	PD
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Bandung	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	10 Kelompok Masyarakat	134.350.000,00	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	10 Kelompok Masyarakat	84.349.100,00	PD
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Bandung	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	50.000.000,00	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	150.000.000,00	PD
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Kab. Bandung**	**Persentase luas kawasan kumuh**	**100%**	**10.909.686.100,00**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Persentase luas kawasan kumuh**	**100%**	**5.089.359.300,00**	**PD**
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	200 Laporan	239.722.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	200 Laporan	84.701.750,00	PD
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2 Dokumen	315.728.000,00	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2 Dokumen	289.750.050,00	PD
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bandung	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	7 Ha	10.354.236.100,00	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	7 Ha	4.714.907.500,00	PD
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Kab. Bandung**	**PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU**	**23,00%**	**12.097.883.400,00**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		**PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU**	**23,00%**	**21.045.494.813,00**	**PD**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Kab. Bandung**	**Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU**	**100%**	**12.097.883.400,00**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU**	**100%**	**21.045.494.813,00**	**PD**
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	600.000.000,00	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	411.005.000,00	PD

Kode Rekening					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Bandung	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	95 Lokasi	3.747.883.400,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	95 Lokasi	11.831.548.500,00	**1.PD : Rp.684.961.890,00 2. Pokir : Rp.11.146.586.610,00**
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman	4 Laporan	350.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman	4 Laporan	544.485.000,00	PD
1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kab. Bandung	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	24 Kelompok	100.000.000,00	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU		Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	24 Kelompok	8.061.263,00	PD
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Bandung	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	24 Lokasi	4.800.000.000,00	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	24 Lokasi	6.565.401.000,00	PD
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Bandung	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	47 Lokasi	2.400.000.000,00	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	47 Lokasi	1.299.389.500,00	PD
1	04	05	2.01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	24 Dokumen	50.000.000,00	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	24 Dokumen	206.015.050,00	PD
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	4 Dokumen	50.000.000,00	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	4 Dokumen	179.589.500,00	PD
2	**10**	**04**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**					
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Kab. Bandung**	**PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**	**75%**	**1.540.610.000,00**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**	**42%**	**1.127.344.200,00**	**PD**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bandung**	**Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi**	**100%**	**1.540.610.000,00**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi**	**100%**	**1.127.344.200,00**	**PD**
2	10	02	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	347.250.000,00	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	275.022.340,00	PD
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.193.360.000,00	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	852.321.860,00	PD
2	**10**	**05**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Kab. Bandung**	**PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN**	**20,00%**	**100.000.000,00**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**		**PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN**	**13,89%**	**89.140.000,00**	**PD**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bandung**	**Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform**	**100%**	**100.000.000,00**	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform**	**100%**	**89.140.000,00**	**PD**
2	10		2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	89.140.000,00	PD

Kode Rekening					Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Kab. Bandung**	**PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA**	**20%**	**1.492.000.000,00**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		**PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN**	**21,67%**	**60.093.253.462,00**	**PD**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bandung**	**Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun**	**100%**	**1.492.000.000,00**	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun**	**100%**	**60.093.253.462,00**	**PD**
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Bandung	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.300.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	59.959.109.962,00	PD
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	192.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	134.143.500,00	PD
JUMLAH II									**85.441.438.013,00**					**143.088.901.496,00**	
JUMLAH I + II									**105.053.240.634,00**					**165.379.668.807,00**	

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

DISPERKIMTAN

2.9 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah berasal dari rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil musrenbang dan pokok – pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Bandung yang masuk dan telah diverifikasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sebagian besar usulan yang masuk ke Disperkimtan adalah pekerjaan stimulan rehab rumah tidak layak huni yaitu sebanyak 604 usulan atau 52,16% dari total seluruh usulan yang masuk.

Rekapitulasi pekerjaan yang diusulkan melalui musrenbang dan pokir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.13 Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Jenis Pekerjaan	Musrenbang	Pokir	Total Usulan
Stimulan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	377	227	604
Pembangunan Jalan Setapak	129	113	242
Pembangunan Kirmir / TPT	105	32	137
Pembangunan Saluran Air Kotor dan Drainase	11	15	26
Pembangunan MCK	5	21	26
Pembangunan Septic Tank Komunal	20	4	24
Pembangunan Sumur Dangkal	27	46	73
Penataan Taman	4	11	15
Penataan TPU	4	7	11
TOTAL	**682**	**476**	**1158**

Pada tahap awal perencanaan, usulan program dan kegiatan pembangunan masyarakat dirumuskan melalui dua kanal utama, yaitu hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bersifat partisipatif dari masyarakat, serta Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD yang merupakan representasi aspirasi konstituen di wilayah masing-masing. Namun, dalam perjalanannya, proses penelaahan usulan program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi riil fiskal daerah dan dinamika kebijakan prioritas pembangunan. Seiring dengan dilakukannya efisiensi anggaran, perubahan arah pembangunan, serta penajaman fokus program strategis, maka dilakukan penyesuaian terhadap sumber usulan kegiatan. Salah satu implikasi dari penyesuaian tersebut adalah peniadaan alokasi anggaran untuk menindaklanjuti usulan dari Musrenbang pada tahun berjalan. Dengan demikian, usulan kegiatan yang masuk ke dalam dokumen perencanaan akhir sepenuhnya berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan keselarasan antara keterbatasan fiskal dan upaya pencapaian target prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dalam Renja Perubahan Tahun 2025, usulan program dan kegiatan yang berasal dari pokok – pokok pikiran DPRD tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2. Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Usulan Pokir yang telah masuk dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) – RI yang telah disepakati dapat dilihat pada tabel T-C.32 di bawah ini.

Tabel II.14 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Kab. Bandung**	**PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**		
1.1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bandung**	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan**		
1.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) H	Kab. Bandung	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10		
	1	Kp Cantel RT 03 Rw 04 desa Margaasih Kec cicalengka, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit	Pokir
	2	Kp Cikarmajaya RW 02 desa Margaasih Kec Cicalengka, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	102 M3	Pokir
	3	Kp Beor RW 09 Desa babakan Peuteuy kec Cicalengka , Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	112,5 M3	Pokir
	4	Kp Tenjolaya RW 07 Desa Tenjolaya, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	67,05 M3	Pokir
	5	Kp Kebon Kapas Kulon RW 07 Desa waluya, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	52,15 M3	Pokir
	6	CPCL yang sudah terverifikasi di wilayah Desa Katapang Kec.Katapang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	7	CPCL Desa Sukamukti RW 08,14,09,10,11,07 Kecamatan Katapang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	8	CPCL Desa Pangauban RW 05,10,11,12,13, Kecamatan Katapang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	9	Se-Desa Pangguh RW. 001 s.d RW. 022 Kecamatan Ibun, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	8 Unit	Pokir
	10	CPCL yang sudah di data Desa Citeureup di RW 01,09,06,02,14 Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	11	Kp jatimekar rt/rw 02/04 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	12	Kp jatimekar rt/rw 04/06 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	13	Kp jatimekar rt/rw 02/05 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	14	Kp jatimekar rt/rw 04/06 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	15	CPCL Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot, , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	16	Kp.Sindang palay RW 05 Desa Pangauban Kec.Katapang, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	76 M3	Pokir
	17	Kp.Baraja RW 19 Desa Cilampeni Kec.Katapang, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	76 M3	Pokir
	18	Bapak Pandi (08132442884), kp. Mekarsari , Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	19	Bapak Ayi Kp. Cikajang Rt. 03 / RW. 16 Desa Lamajang , kecamatan Pangalengan (Pengusul Ibu Popon K 085722741518), Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	20	Kp. Pasirhanjunag Rt. 01 Rw. 04 Desa Warjabakti , Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	21	Bapak Apud Mahmudin (08891178824), Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	22	Ibu Ida Kusminar (083824675488), Kp. Kamasan Rt. 04 / RW. 02 , Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	23	Kp.Parunghalang Rt.07/ rw.02 Desa Andir, Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	24	Kp.Sadangsari Rt.03/ rw.04 Desa Andir, Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	25	Kp jatimekar rt/rw 02/06 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	67,02 M3	Pokir
	26	Kp.Lampegan Rt01/Rw04 No.49 Desa.Bojongkunci Kec.Pameungpeuk, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	27	Jln.Gudang Belerang Rw04 Desa Ciwidey Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	113,08 M3	Pokir
	28	Kp.Citisuk Rt02/Rw10 Desa Nengkelan Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	29	Kp.Bojonggadog Rt01/Rw01 Desa Rawabogo Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	30	Kp.Ngamprah Rt03/Rw08 Desa Nengkelan Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	31	Kp.Pamekarsari Rt01/Rw02 Desa Ciwidey Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	32	Kp.Ngamprah Rt01/Rw08 Desa Nengkelan Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	33	Cimuncang Selatan Rt01/Rw08 Desa Ciwidey Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	34	Kp. Babakan Desa Cipinang Rt. 01 Rw. 09 Desa Cipinang, Kecamatan	#PK Pembangunan Jalan Setapak	83,64 M3	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cimaung, Kab. Bandung			
	35	Kp.Pasawahan Rt 02/Rw12 Desa Buninagara Kec.Kutawaringin, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	36	Kp.LebakMuncang Rt04/Rw05 Desa Lebakmuncang Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	37	Kp.Mumunggang Rt02/Rw14 Desa Ciwidey Kec.Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	38	Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	6 Unit	Pokir
	39	RT 002 RW 013 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	78,25 M3	Pokir
	40	Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	41	RT/RW 04/08 & RT/RW 03/01 DESA MEKARLAKSANA KEC. CIKANCUNG, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	42	KP CIKANCUNG GIRANG RT 02 RW 05 S/D RT 04 RW 06 DESA CIKANCUNG KEC.CIKANCUNG, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	43	KP. CIBIUK RT 01-04 RW 08 DESA CIKANCUNG KEC. CIKANCUNG, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	44	Kp. Rancatungku RW 1 DESA RANCATUNGKU KECAMATAN BANJARAN, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	120,42 M3	Pokir
	45	RW 07, RW 06 dan RW 10 Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	4 Unit	Pokir
	46	Kp. Rancatungku RW 1 Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	141,4 M3	Pokir
	47	RT 01/13, Ds. Majasetra, Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	48	Aca, RT 03/06, Ds. Majasetra, Kec. Majalaya, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	14 Unit	Pokir
	49	RT 01 RW 13, Ds. Majasetra, Ds. Majalaya, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	50	Kp. Leuwigadung RT 01 RW 10 Desa Ciapus Kec. Banjaran , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	51	Kp. Ciceret RT 01 RW 11 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	52	Kp. Pondoksirap RT 02 RW 18 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	53	Kp. Sukamulya Rt.01/03 Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	54	Kp. Sukamulya Rt.02/03 Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	55	Kp. Sukamulya Rt.01/03 Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	67,73 M3	Pokir
	56	KP. UBRA DS. CIAPUS KEC. BANJARAN KAB. BANDUNG, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	67,73 M3	Pokir
	57	Kp. jagabaya kaler RT.02/04 Ds. Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	58	KP. Cimenteng RT.01/16 Ds. Jagabaya Kec. Cimaung Kab. BAndung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	59	Kp. Jagabaya kaler RT.02/04 Ds. Jagabaya Kec. Cimaung Kab.	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bandung, Kab. Bandung			
	60	Kp. Jagabaya kaler RT.01/04 Ds. Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	61	Kp. Batunumpuk RT.03/02 Ds. Mekarjaya Kec. Banjaran Kab. Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	62	BPK UJANG SURYAMAN KP BANYUSARI DESA MAGUNGHARJA , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	63	KP LEMBANG 1/10 DESA BABAKAN KEC. CIPARAY, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Kirmir/TPT	74,08 M3	Pokir
	64	KP KEMBARSARI RW.14 DESA NAGRAK, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	65	DESA MARUYUNG KEC. PACET, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	4 Unit	Pokir
	66	kp sayati hilir rt 01 rw 08 desa sayati kecamatan margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	67	Kp.sayati hilir Rt.01/08 Desa.sayati Kab.bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	68	KP.LEUWEUNG KALENG RT.001/RW.002 DESA.KATAPANG KEC.KATAPANG , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	69	KP.BIHBUL RT.003/RW.002 DESA.MARGAHAYU TENGAH KEC.MARGAYU, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	119,98 M3	Pokir
	70	Kp.pasawahan RT.002 RW.012 Dsa.katapang Kec.katapang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	71	KP.JUNTI GIRANG RT.002 RW.011 DESA.BANYUSARI KEC.KATAPANG, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	72	Rumah bapak eming, Kp. Babakan Wadat RT 01 RW 06, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	73	Kp. Pasir Pari RT 02 RW 03, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	74	Kp. Pangauban RW 15, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	75	Kp. Dayeuh Luhur RT 02 RW 04, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	76	Kp. Gunung Barang RT 03 RW 03, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	77	Kp. Sadang RW 05, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	78	Kp. Sukamahi RW 06, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	79	Kp. Rancabogo RW 07, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	80	Kp. Sayuran RW 08, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	81	Kp. Pamoyanan RW 09, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	82	Kp. Citeureup Rt 02 Rw 07 desa sukamukti kec. Katapag, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	87,62 M3	Pokir
	83	Kp. Kiara Sanding, RT. 003, RW. 014, Desa Pulosari, Kec.	#PK Pembangunan Jalan Setapak	123,74 M3	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pangalengan, Kab. Bandung			
	84	Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	15 Unit	Pokir
	85	Kampung Babakan Siliwangi atau Kina 3, Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	86	Cikalong, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	87	Kp. Cibiuk RT.04 RW.15 Desa. Margaasih Kecamatan. Margaasih , Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	98,73 M3	Pokir
	88	Kp. Cibiuk RT.04 RW.15 Desa. Margaasih Kecamatan. Margaasih , Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	98,73 M3	Pokir
	89	Kp. Cibiuk RT.04 RW.15 Desa. Margaasih Kecamatan. Margaasih , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	8 Unit	Pokir
	90	RT. 01 RW. 05 Desa Rancaekeke Kulon, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	98,35 M3	Pokir
	91	Jalan Stasion RT, 03 RW. 06 Desa Rancaekek Wetan, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	10 Unit	Pokir
	92	Kp. Cikalage Girang RT. RT. 04 RW. 08 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	98,35 M3	Pokir
	93	Kp Babakan Tipar RW 17 Desa Lamajang kec. pangalengan, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	94	desa cimaung kec cimaung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	95	desa tarajusari kec. banjaran, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	96	kp. sukamenak RT 4 RW 2 Desa Margamukti Kec. Pangalengan, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	49,39 M3	Pokir
	97	RT 003 RW 11 Desa Cilampeni Kec Katapang atas nama Wiwin, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	98	RT 001 RW 011 Desa Cilampeni Kec Katapang atas nama Lilis, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	99	RW 005 Desa Banyusari Kec Katapang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	100	RW 006 Desa Banyusari Kec Katapang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	101	Desa Cisondari RW 01 dan RW 05 Kecamata Pasirjambu, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	97,67 M3	Pokir
	102	Desa Nengkelan RW 005 dan RW 006 Kecamatan Ciwidey, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	97,67 M3	Pokir
	103	Kp. Bojong Jambu RT 002 RW 010 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Kirmir/TPT	37,26 M3	Pokir
	104	Kp. Babakan Jeruk RT 002 RW 013 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	31,72 M3	Pokir
	105	Desa Sadu Kecamatan Soreang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	106	RT 04 RW 01 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	59,72 M3	Pokir
	107	Jajang Rohana RT 02 RW 17 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	108	Yaya RT 03 RW 22 Desa Cibereum Kecamata Kertasari, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	109	RW 09 Desa Girimulya Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	8 Unit	Pokir
	110	KP. PISITAN RT/RW 001/008 DESA SINDANGSARI KECAMATAN PASEH	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	10 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		KABUPATEN BANDUNG, Kab. Bandung			
	111	kp bojongkeusik rt 003 rw 018 desa panyadap kecamatan solokanjeruk, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	149 M3	Pokir
	112	kp bukatanah rt 002 rw 003 desa loa kecamatan paseh, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	113	Kp bojongkeusik rw 18 desa panyadap solokanjeruk, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	113,7 M3	Pokir
	114	Kp. Pamubusan RT 04 RW 08 Desa Tenjolaya Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit	Pokir
	115	Kp. Legok Kiara RT 03 RW 08 Desa Rawabogo, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Kirmir/TPT	149 M3	Pokir
	116	KP. Cinta Asih RT 02 RW 11 Desa Sugihmukti Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	117	KP. Gadog Lempeng RT 03 RW 16 Desa Sukawening Kec. Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	118	Kp. Pancuran Luhur RW 20 Desa Alam Endah Kec. Rancabali, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	119	KP PANGAUBAN RT 01 RW 08 DESA TENJOLAYA KEC. PASIR JAMBU, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit	Pokir
	120	KP TALAGA RT 01 RW 06 DESA CISONDARI KEC PASIRJAMBU, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit	Pokir
	121	KP SALAMANJAH RT 02 RW 04 DESA MEKARMAJU KEC PASIR JAMBU, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit	Pokir
	122	Desa Sukamukti Kecamatan Katapang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	123	KP. PUNCAK RT 001 / RW 011 , DESA MEKARJAYA , KECAMATAN PACET , (ATAS NAMA ETI) , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	124	KP. Babakan Tanjung RT 04 RW 05 Desa Sugihmukti Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	118,45 M3	Pokir
	125	KP RENCONG RT 07 / RW 011 , KELURAHAN ANDIR , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	95,23 M3	Pokir
	126	KP CIMUNCANG RT 01 / RW 12 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , (ATAS NAMA NANA MULYANA) , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	127	KP SUKAHAJI RT 03 / RW 03 , DESA SUKAPURA , KECAMATAN KERTASARI (ATAS NAMA KUSNADI) , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	128	KP SUKAHAJI RT 03 / RW 03 , DESA SUKAPURA , KECAMATAN KERTASARI (ATAS NAMA ENDANG S) , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	129	KP SUKAHAJI RT 03 / RW 03 , DESA SUKAPURA , KECAMATAN KERTASARI , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	130	KP SUKAHAJI RT 003 / RW 003 , DESA SUKAPURA , KECAMATAN KERTASARI (ATAS NAMA TAUFIK), Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	131	KP MANGGAHANG RT 08 / RW	#PK Stimulan Rehab. Rumah	1 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		06 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH (ATAS NAMA TATA SUHATA) , Kab. Bandung	Tidak Layak Huni		
	132	KP SUKAMAHI RT 002 / RW 006 , DESA SAGARA CIPTA , KECAMATAN CIPARAY (M PASHA) , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	133	KP SADANG RT 003 / RW 005 , DESA SAGARACIPTA , KECAMATAN CIPARAY (ATAS NAMA AISYAH) , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	134	KP SINDANG HEULA RT 003 / 010 , DESA NAGRAK , KEC PACET , KAB BANDUNG , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	135	KP NEGLASARI RT 005 / RW 011 , KELURAHAN MANGGAHANG , KEC BALEENDAH (ATAS NAMA ENAN) , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	136	KP LEMBANGSARI RT 002 / RW 009 , DESA TARUMAJAYA , KECAMATAN KERTASARI , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	137	KP SADANG RW 05 , DESA SAGARA CIPTA , KECAMATAN CIPARAY (PAK AYI) , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	138	KP CIMUNCANG RT 001 / RW 013 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	139	KP BABAKAN RT 001 / RW 014 , DESA PANGAUBAN , KECAMATAN PACET , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	140	KP CIHERANG RT 01 / RW 05 , DESA GIRIMULYA , KECAMATAN PACET , Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	92 M3	Pokir
	141	KP CIHERANG Rt 003 rw 006 , desa girimulya, kecamatan pacet kabupaten bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	142	RT 01 RW 08 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	143	RT 06 RW 13 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	144	RT 02 RW 08 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	145	Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayuehkolot, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	146	Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	147	Gang Al Hidayah RT 03 -04 RW 17, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	63,45 M3	Pokir
	148	RT 04 RW 17 Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	38 M3	Pokir
	149	Kp. Lebak Kampeng RT 70 RW 72 Desa Mandalahaji Kec. Pacet, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	124,13 M3	Pokir
	150	Kp. Cinunuk RT 05 RW 03 Desa Tanjungwangi Kec. Pacet a/n Aceng Kurnia, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit	Pokir
	151	Kp. Kelebuhan Bulan RT 02 RW 05 Desa Babakan Kec. Ciparay a/n Juju Juhanah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	152	Kp. Kelebuhan Bulan RT 01 RW 05 Desa Babakan Kec. Ciparay A/n Suartiah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	4 Unit	Pokir
	153	Kp. Sadang RT 02 RW 05 Desa Sagaracipta Kec. Ciparay a/n Aan B, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	154	Kp. Cinunuk RT 04 RW 03 Desa Tanjungwangi Kec. Pacet a/n Wawa, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	4 Unit	Pokir
	155	Kp. Sadang RT 03 RW 05 Desa Sagaracipta Kec. Ciparay a/n Muslih, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	156	Kp. Sadang RT 03 Rw 05 Desa Sagaracipta Kec. Ciparay a/n Dadan, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	157	Desa Karyalaksana, Kec. Ibun, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	158	Kp. Cieuri, RW 01, Desa Lampegan, Kec. Ibun, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	159	Desa Cibeet, Kec. Ibun, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	160	Kp. Sadang RT 03 RW 05 Desa Sagaracipta Kec. Ciparay a/n Sarifah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	161	Kp. Sadang RT 03 RW 05 Desa Sagaracipta Kec. Ciapay a/n Ai Yuli, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	162	Kp. Sadang RT03 RW 05 Desa Sagarcipta kec. ciparay a/n cucun, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	163	Rt 02 RW 13 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu (Jalan Blok F 8), Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	164	warga kp.cipatat rt 03 rw 011 desa lagadar kec.margaasih , Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	87,5 M3	Pokir
	165	Kp Tonggoh Gudang RT 03 RW 07 Desa Margamulya Kec Pasirjambu, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	80,71 M3	Pokir
	166	Kp Cinta Asih RW 16 Desa Margamulya Kec Pasirjambu, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	114 M3	Pokir
	167	Kp Nyalindung RW 16 Desa Margamulya Kec Pasirjambu, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	114 M3	Pokir
	168	Kp Ciseupan RT 02 RW 04 Desa Panyocokan Kec Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	169	KP Singkur Rt 2 Rw 6 Desa Jatisari Kec Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	170	Kp Sodong Rt 5 Rw 2 Desa Jatisari Kec Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	171	Kp Wangun Rw 8 Desa Jatisari Kec Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	172	Kp Nagrak Rt 4 Rw 2 Desa Jatisari Kec Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	173	Kp Pananjung Rt 2 Desa Pananjung Kec Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	174	Kp Cikancung Rt 3 Rw 8 Desa Pananjung Kec Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	175	Kp Ciluncat Rt 1 rw 4 Desa Ciluncat Kec Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	176	Kp Arca RW 27 Desa Alamendah Kec Rancabali, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	177	Kp Babakan Jampang RT/RW 03/17 Desa Alamendah Kec Rancabali, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	178	RT 03, RW 05, Desa	#PK Stimulan Rehab. Rumah	2 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Mekarpawitan, Kec. Paseh, Kab. Bandung	Tidak Layak Huni		
	179	Kp. Sirahranca RW 09 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	180	kp, Pasir Mono RT 003/012 Desa Padaulun Kecamatan Majalaya, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	181	Kp. Padarek RT 002/002 Desa Drawati Kecamatan Paseh, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,68 M3	Pokir
	182	Kp. Sayang RW 08 Desa Rancatungku Kecamatan Pameungpeuk, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	183	wilayah Desa Wangisagara, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	10 Unit	Pokir
	184	Wilayah Desa Padaulun, , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	9 Unit	Pokir
	185	Kp. Rancasaar RT001/012 Desa Wangisagara Kec. Majalaya, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	186	Kp. Manjahbeureum RW. 12 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	51 M3	Pokir
	187	Kp. Nyalindung RW. 11 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	188	Kp. Gedong RW. 10 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	122,44 M3	Pokir
	189	Kp. Panyawungan RW. 03 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	122,38 M3	Pokir
	190	Kp. Panyawungan RW. 03 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	191	Kp. Sekejengkol RW. 14 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	192	Kp. Cikoneng III RW. 03 Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	193	Kp. Nyalindung RW. 9 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	194	Kp. Galumpit RW. 23 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	195	Kp. Gumuruh RT.01 RW.04, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	101,12 M3	Pokir
	196	Jl paledang no 60 kp. Paledang Rt 04 Rw 09 desa Bojong kuncing, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	125,38 M3	Pokir
	197	kp lamping rt 03 rw 06 desa cipinang kec cimaung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	118,03 M3	Pokir
	198	kp. lamping rt. 02 rw 06 desa cipinang kec cimaung , Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	110 M3	Pokir
	199	Kp. sukamaju rt 01 rw 09 desa bojong kuncii kec pameungpeuk, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	200	kp lamping rt 01 rw 06 desa cipinang kec cimaung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	201	kp lamping rt 02 rw 06 desa cipinang kec cimaung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	202	kp hegar manah rt 03 rw 01 desa cipinang kec cimaung, Kab.	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bandung			
	203	ibu popon kp. statsion Rt 03/ 04 Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	204	Kp Saparako Rw 17 desa Majalaya Kec Majalaya, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	205	Kp Cimaranggi Rt 02 Rw 01 Ds Padamulya Kec Majalaya, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	206	Kp. Ciodeng RT. 02 RW. 07 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	207	Kp Cibodas Rt 01 Rw 01 Ds Cibodas Kec Solokan Jeruk, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	208	kp ranca enong Rt 01 Rw 16 Ds Cibodas Kec Solokan Jeruk, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	209	Kp. Ciodeng RT. 01 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	210	Kp. Mekarsari RW. 27 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	112,2 M3	Pokir
	211	Kp. Cigado RT. 04 RW. 09 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	112,2 M3	Pokir
	212	Kp Ranca nyiruan RT 03 RW 03 Ds Cibodas Kec Solokan Jeruk, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	213	Kp Curug Rt 01 Rw 10 Ds Drawati Kec Paseh, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	148,59 M3	Pokir
	214	Kp Mekar Rahayu Rw 07 Ds Majalaya Kec Majalaya, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	66,44 M3	Pokir
	215	Kp Situdayung Rt 02 Rw 03 Ds Neglasari Kec Ibun, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	216	Kp Pasir parahu Rt 03 Rw 03 Ds Neglasari Kec Ibun, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	217	Kp. Jambatan RW. 09 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah (RT.2, RT.4, RT. 4, RT.5, RT.8), Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	218	Kp Situdayung Rt 03 Rw 03 Ds Neglasari Kec Ibun, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	219	RW 16 Desa Lagadar Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	220	RW 21 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	221	kp.parakan panjang rt 02 rw 02 kelurahan cibeunying kecamatan cimenyan, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	222	Kp Warung Lahang Rt 01 Rw 15 Nagrog Cicalengka, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	223	Kp Cinarusa Rt 02 Rw 09 Mandalawangi Nagreg, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	224	Kp Cikasungka Rt 04 Rw 01 Cikasungka Cikancung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	225	Kp Cinarusa Rt 03 Rw 09 Mandalawangi Nagreg, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	226	Kp.babakan tetelar rt 04 rw 06.desa rancaekek kulon.kec.rancaekek, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	227	Kp. Cipeutag RT 03 RW 07 Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	110 M3	Pokir
	228	Kp. Cukang lemsh RT 03 RW 10 Desa Tenjolaya Kecamatan	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	110 M3	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cicalengka, Kab. Bandung			
	229	A/N LENI MARLINA KP. Linggar RT 02 RW 10 Desa Linggar Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	230	KP. SIMPEN RT 05 RW 05 DESA TENJOLAYA KECAMATAN CICALENGKA, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	231	KP. JAMBAN RW 11 DESA CICALENGKA WETAN KECAMATAN CICALENGKA, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	232	A/N DIDI KP. SAWAH LEGA RT 02 RW 03 DESA NAGROG KEC. CICALENGKA, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	233	A/N YATI KP. SAWAH LEGA RT 02 RW 03 DESA NAGROG KEC. CICALENGKA, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	234	KP. MALINGPING RT 02 RW 08 DESA TENJOLAYA KEC. CICALENGKA, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	109,03 M3	Pokir
	235	RT 02, RW 03, Desa Talun, Kec. Ibu, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	120,09 M3	Pokir
	236	Kp. Nengta, RW 06, Desa Mekarwangi, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	237	Kp. Cinangewer RT. 03/11 Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	238	Kp. Rancagadog RW. 02 Desa Tribaktimulya Kecamatan Pangalengan, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	78,09 M3	Pokir
	239	Kp. Sindangreret RT 003 010 Ds. Cibiru Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	240	Kp. Pasirwangi No. 41 RT 002 RW 008 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	241	RT 001 RW 009 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	242	Kp. Cijeruk RT 005 RW 019 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	243	Kp. Cijeruk RT 005 RW 019 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsoang , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	244	Kp. Cijeruk RT 003 RW 019 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	245	Kp. Cijeruk RT 002 RW 019 Ds. Bojongsari Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	246	Kp. Cijeruk RT 004 RW 019 Ds. Boongsari Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	247	PAMUBUSAN RT 1 RW 4 DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit	Pokir
	248	Kp. Cipulus Wetan RT. 03/09 Desa Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	31,72 M3	Pokir
	249	DESA TANGSIMEKAR KECAMATAN PASEH, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	250	kp tenjolaya rt 03 rw 06 desa ciluncat kecamatan cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	4 Unit	Pokir
	251	kp singkur Rt 03 Rw 06 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	4 Unit	Pokir
	252	kp singkur Rt03 Rw06 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab.	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	4 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bandung			
	253	kp salamanjah Rt 04 Rw 01 Desa Jatisari Kecamatan cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	4 Unit	Pokir
	254	kp tenjolaya Rt 01 rw 06 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	255	kp singkur Rt 01 rw 06 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	256	kp legok harendong rt 04 rw 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	257	kp Cirangang RT 02 RW 05 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	258	kp salamanjah rt 01 Rw 01 Desa jatisari Kecamatan Cangkuang , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	259	kp Legok Harendong RT 01 RW 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	260	kp Salamanjah Rt 03 Rw 01 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	261	kp Cisalak Rt 05 Rw 03 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	262	Kp Salamanjah RT 02 Rt 01 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	263	kp tenjolaya RT 3 RW 06 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	264	kp singkur RT 02 RW 06 Desa Jatisari Kecamatan cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	265	kp Tenjolaya RT 03 RW 06 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	266	kp legok Harendong rt 02 rw 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	267	kp legok Harendong rt 01 rw 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	268	kp Naggerang RT 04, RT 02, RT 03, RT 04,RW 02 Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	4 Unit	Pokir
	269	kp salamanjah Rt 04 RW 01 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	270	kp Legok Harendong RT 02 RW 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	271	Kp Sukamanah RT 02 Rw 05 Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	272	Kp sukamanah Rt 02 Rw 05 Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	273	Kp salamanjah Rt 01 Rw 01 Desa Jatisari kecamatan Cangkuang atas nama aan karwati, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	274	Kp Cangkuang Rt 02 Rw 12 Desa cangkuang Kecamatan cangkuang kabupaten bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	275	Kp Cangkuang Rt 02 Rw 01 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	276	Kp cangkuang Rt 02 Rw 01 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang kabupaten Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	277	Kp Cangkuang Rt 01 Rw 01Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang kabupaten Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	278	Kp cangkuang Rt 03 Rw 01 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang kabupaten Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	279	Kp Cangkuang Rt 02 Rw 01 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang kabupaten Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	280	Kp Kadu Rentas Rt 02 Rw 04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	281	RT 03 RW 04 Cangkuang wetan, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	122,81 M3	Pokir
	282	Ciguriang girang RT 003 RW 004 (Hendra), Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	283	Kp Pasawahan RT 001 rw 12 Desa Sayati (suherman) Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	284	Kp Curug dog dog rt 06 rw 02 Desa Sukamenak Kec Margahayu (Oneng), Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	285	Kp Curug Dog DOg rt 06 rw 10 (dayat) desa sukamenak kec margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	286	KP Manglid Gg Manglid IV no 103 (Romlah) Desa Margahayu Selatan Kec Margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	287	Sayati II no 12 B, rt 01 rw 07 (cucu Rosidah) desa sayati kec margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	288	rw 18 dan rw 19 Desa Lagadar Kec Margaasih, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	289	rt 05/02 kmpng cibedug girangrt 05/02 desa cangkuang wetan,kec dayeuhkolot, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	290	Rt 03/10 (Lia natalia.) kp cibogo desa cangkuang kulon Kec Dayeuhkolot, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	291	Kp. ciguriang hilir rt.1 rw.4 desa. cangkuang wetan kec. dayeuhkolot, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	292	Kp Burujul rt 05 rw 05 Desa MArgaasih Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	293	Kp. Sukabirus rt. 01 rw.13 Desa Citeureup Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	294	rt 02 rw 03 desa cigondewah hilir kecamatan margaasih, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	295	Kp. Pamyingkuran rt.4 rw.8 desa margahayu selatan kec. margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	296	Gang Sayati 1 Desa Sayati Kec. Margahayu, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	297	Lebakwangi RW 03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kab Bandung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,56 M3	Pokir
	298	RW 08 Desa Wargaluyu Kec Arjasari Kab Bandung, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Kirmir/TPT	59,61 M3	Pokir
	299	Desa patrol Sari Kec Arjasari kab Bandung, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	5 Unit	Pokir
	300	KP Cicarirang RW 08 Desa Wargaluyu, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	75 M3	Pokir
	301	Kp. Cipicung RW 1 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah,	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kab. Bandung			
	302	Kp. Cipicung RW. 02 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	303	Kp. Sepen RW. 13 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	304	Kp. Kulalet RW. 14 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	305	Kp. Mekarsari RW. 23 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Pokir
	306	Kp. Cigosol RT. 3,4,5,7 RW. 9 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	86,9102791878173 M3	Pokir
	307	KP GANASABRANG RT.01 RW.04 DESA TENJOLAYA KECAMATAN PASIRJAMBU, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	308	KP PADAHURIP RT.03 RW.10 DESA SUKAMULYA KECAMATAN KUTAWARINGIN, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	309	KP BOBOJONG RT.02 RW.11 DESA BUNINAGARA KECAMATAN KUTAWARINGIN, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	310	KP NYALINDUNG SANINTEN RT.04 RW.02 DESA MARGAMULYA KECAMATAN PASIRJAMBU, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	80,03 M3	Pokir
	311	kp. Sompok Rt 01/ Rw 04 kp sompok Desa wargaluyu kec Arjasari., Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	312	rt 02 / rw 04 kp sompok Desa wargaluyu kec Arjasari., Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	313	rt 01 / Rw 04,,Desa wargaluyu kec Arjasari., Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	10 Unit	Pokir
	314	Kp. Srikandi Desa Wanasuka Rw 02 RT 02/03 kec pangalengan, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	80 M3	Pokir
	315	Kp. Srikandi Desa Wanasuka Rw 02 RT 02/03 kec pangalengan, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	120 M3	Pokir
	316	Rw 01 RT 01 kp.Srikandi Desa Wanasuka Kec Pangalengan, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	100 M3	Pokir
	317	Rw 02 RT 05 kp.Srikandi Desa Wanasuka Kec Pangalengan, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	318	RT 06 RW 02 kp Srikandi desa wanasuka kec pangalengan, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	149 M3	Pokir
	319	Kp. Gunung Pipisan RT 02 RW 04 Ds. Bojong Manggu kec. Pameungpeuk Kab. Bandung, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	320	rw 17 RT 2 desa margamulya kec pangalengan kab bandung, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Kirmir/TPT	149 M3	Pokir
	321	desa marga mekar rw 7, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	110,67 M3	Pokir
	322	Rt 02/01 desa Malasari, kec Cimaung rumah ibu Dede , Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	323	Kp. Srikandi RT 02/02 desa Wanasuka kec Pangalengan, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	324	Kp margaluyu Rt 1 Rw 14	#PK Stimulan Rehab. Rumah	3 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kelurahan Jelekong, Kab. Bandung	Tidak Layak Huni		
	325	Kp Pereng Rt 1 rw 12 Desa Pangauban, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	3 Unit	Pokir
	326	Kp Babakan Cianjur Rt 5 Rw 9 Desa Sumbersari Kec Ciparay, Kab. Bandung	#PK Stimulan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni	2 Unit	Pokir
	327	Kp Pangauban Rt 1 rw 4 Desa Pangauban kec pacet, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	122,99 M3	Pokir
	328	Kp. Sukamulya Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	329	Kp. Jagabaya RT.01/04 Ds. Jagabaya Kec. Cimaung Kab. Bandung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	330	Kp Legok Panglay RT 02 Rw 03 Desa Dampit Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	149 M3	Pokir
	331	RW 03 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	122,2 M3	Pokir
	332	KP. CICERET DS. CIAPUS KEC. BANJARAN KAB. BANDUNG, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	63,45 M3	Pokir
	333	Kp. Kara RW. 02 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi , Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	87,87 M3	Pokir
	334	Kp. Sindangsari RT. 04 - 05 RW. 21 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	87,87 M3	Pokir
	335	Kp. Cihaliwung RW. 19 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	336	Kp. Cihuni RW. 11 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	337	Kp. Galumpit RW. 16 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	338	LIO WARUNG GEDE RT.2 RW.12 DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	339	PAJATEN RT.1 RW.19 DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	340	BABAKAN PANDAN RT.3 RW.2 DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	63,45 M3	Pokir
	341	RW 03 Desa Patrolsari Kec Arjsari kab Bandung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	342	RW 03 Desa Batukarut Kec Arjasari Kab Bandung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	343	RW 05 Desa mekarjaya Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	344	RW 05 Desa Mekarjaya Kec Arjasari kab Bandung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	95 M3	Pokir
	345	Kp. Mekarsari RW. 28 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	119,59 M3	Pokir
	346	Kp. Mekarsari RT. 3 RW 23 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	119,59 M3	Pokir
	347	JL. GANG RT.02 RW.17 KP PAMEKARAN DESA PANUNDAAN KECAMATAN CIWIDEY, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	348	Kp Cianong Rt 01 Rw 10 Desa Dukuh Kec IBUN, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	74,55 M3	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	349	PERUM RT 01,02 RW 13 Ds LOA KEC PASEH, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	74,55 M3	Pokir
	350	JL. GANG RT.03 RW.16 GAMBUNG DESA SUKAWENING KECAMATAN CIWIDEY, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	351	kp.pasir angin RT.03 RW.10 Desa Rawabogo kec.Ciwidey, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	63,45 M3	Pokir
	352	Rt 04 Rw 10 Ds Majakerta Kec Majalaya, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	353	Kp Sawah Tengah Rt 03 Rw 13 Ds Padaulun Kec Majalaya, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	354	Perum Griya Inti RT 01 RW 10 Desa babakan Peuteuy, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	149 M3	Pokir
	355	Kp sangkan Rt 02 Rw 10 Ds Laksana Kec Ibun, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	149 M3	Pokir
	356	Rt 02 Rw 09 Desa Bojong Kec Majalaya, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	149 M3	Pokir
	357	RW 11 Desa Mekarjaya Kec Arjsari , Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Kirmir/TPT	100,37 M3	Pokir
	358	jalan setapak Kp. Bojong Salak RW 21 , Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	63,45 M3	Pokir
	359	RT 003 RW 005 Desa Cangkuang, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	81,11 M3	Pokir
	360	Kp. Ciayunan RT 002 RW 006 Desa Cicalengka Wetan, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	80 M3	Pokir
	361	RW 01 DESA TARUMAJAYA, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Kirmir/TPT	125,46 M3	Pokir
	362	KP LEUWI JAMBU RT.04 RW.13 DESA MEKARSARI KEC CIPARAY, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	363	Cigondewah Hilir RT.01 RW.02 Desa. Cigondewah Hilir Kecamatan. Margaasih , Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	149 M3	Pokir
	364	Kp. Mahmud RT.04 RW.04 Desa. Mekarrahayu Kec. Margaasih , Kab. Bandung	#PK Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	365	Jl. SMPN 1 Cileunyi Ds. Cimekar Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	90,355 M3	Pokir
	366	Kp. Sindangreret RT 03 RW 10 Ds. Cibiru Wetan Gang Sinder 2, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	100 M3	Pokir
	367	RT02/03 Kp. Maruyung Desa Cipinang Kec. Cimaung, Kab. Bandung	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	149 M3	Pokir
	368	Panyindangan RT/RW:01/05,,DS: MARGAMULYA kec Pangalengan, Kab. Bandung	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	369	JL. SITU CITARUM SUKASARI RT 05 RW 14 DESA TARUMAJAYA KEC. KERTASARI	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
	370	JL. SITU CITARUM SUKASARI RT 05 RW 14 DESA TARUMAJAYA KEC. KERTASARI	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	149,03 M3	Pokir
	371	Kp. Cihalimun RT 04 RW 05 Desa Cibeureum Kec. Kertasari	#PK Pembangunan Kirmir/TPT	149,03 M3	Pokir
	372	Kp. Cinengkelan RT 02 RW 17 Desa Resmitinggal Kec. Kertasari	#PK 'Pembangunan Jalan Setapak	126,9 M3	Pokir
2	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN**	**Kab. Bandung**	**PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU**		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	UTILITAS UMUM (PSU)				
2.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Kab. Bandung**	**Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU**		
2.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Bandung	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
	1	Kp. Leuwiliang RT 03 RW 06 Desa Tanjungwangi Kec. Cicalengka, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 *	320 M	Pokir
	2	TPU RW 06 Kp.Cikambuy Desa Sangkanhurip Kec.Katapang, Kab. Bandung	#PK Penataan TPU Tipe A	219,38 M2	Pokir
	3	TPU RW 17 Kp.Lebak Muncang Desa Cilampeni Kec.Katapang, Kab. Bandung	#PK Penataan TPU Tipe A	219,38 M2	Pokir
	4	Kp. Cijengkol RT. 003 RW. 013 Desa Cipaku Kecamatan Paseh, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 *	197,33 M	Pokir
	5	Kp.Nyampai Rt04/Rw09 Desa Sugihmukti Kec.Pasirjambu, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	6	KP BABAKAN SUGIH WARGI RT 03 RW 08 DESA TANJUNGLAYA KEC. CIKANCUNG, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	7	KP CIKAMUNING RT 01 RW 06 DESA MANDALASARI KEC. CIKANCUNG, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	8	RW.01 DESA SANTOSA KEC. KERTASARI, Kab. Bandung	#PK Jamban + Septic Tank Pabrikasi	2 Unit	Pokir
	9	Kp. Nenggang RT 02 RW 07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I	1 Unit	Pokir
	10	Kp. Cipongporang RT 02 RW 19, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I	1 Unit	Pokir
	11	Kp. Lewi Raja RT 04 RW 17, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I	1 Unit	Pokir
	12	kam.pamoyanan rw 12 desa sindangpanon kec.banjaran , Kab. Bandung	#PK Penataan TPU Tipe A	221,58 M2	Pokir
	13	TPU RW.04 Desa Kiangroke Kec.Banjaran, Kab. Bandung	#PK Penataan TPU Tipe A	221,58 M2	Pokir
	14	RT 002 RW 009 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah Dengan Greffel 1/2 Dia 20 Cm Tanpa Tulangan	157,84 M	Pokir
	15	RT 003 RW 012 Desa Soreang Kec. Soreang, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah Dengan Greffel 1/2 Dia 20 Cm Tanpa Tulangan	157,84 M	Pokir
	16	RT 005 RW 002 Desa Sayati Kec. Margahayu, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 *	157,84 M	Pokir
	17	Kp. Patrol RW 15 Desa Sadu Kecamatan Soreang, Kab. Bandung	#PK Penataan TPU Tipe A	364,96 M2	Pokir
	18	RW 22 Desa Cibereum Kecamatan Kertasari, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 *	320 M	Pokir
	19	RW 09 KEL ANDIR KEC BALEENDAH, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	20	KP. Babakan Tanjung RT 02 RW 05 Desa Sugihmukti Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	21	Gg. Sayati RT 03 RW 07 Desa Sayati Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah	165,81 M	Pokir
	22	Kp Ciguriang Girang RT 01-RT 04	#PK Saluran Dengan Pasangan	160 M	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		RW 04 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung	Batu Belah		
	23	Kp. Babakan Nugraha RT 03 RW 23 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah	160 M	Pokir
	24	KP PASAR KEMIS RT 006 / RW 014 , KELURAHAN MANGGAHANG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	25	KP JELEKONG RW 003 / KELURAHAN JELEKONG , KECAMATAN BALEENDAH , Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	26	Kp Ciparay Hilir RT 04 RW 11 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I	1 Unit	Pokir
	27	RT 06 RW 01 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Menara Besi Air 4M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	28	RT 06 RW 01 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih , Kab. Bandung	#PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	29	RT 06 RW 01 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih , Kab. Bandung	#PK 'Sumur Dangkal 70M	1 Unit	Pokir
	30	RW 06 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	31	Rw 06 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih , Kab. Bandung	#PK Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	32	RW 06 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Menara Besi Air 4M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	33	RT 01 RW 08 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	34	RT 01 RW 08 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	35	RT 01 RW 08 Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Menara Besi Air 4M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	36	Cibedug Girang RT 01 RW 02 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I	1 Unit	Pokir
	37	RW 6 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih , Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I	1 Unit	Pokir
	38	Cigondewah hilir rt 02 rw 09 desa lagadar kec. margaasih, Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	196,65 M2	Pokir
	39	Kp. Palawija Rt 02 Rw 10 Desa Mekarsari Kec. Ciparay, Kab. Bandung	#PK Penataan TPU Tipe A	364,96 M2	Pokir
	40	1. Kp. Neglasari RT 008 Rw 011 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK 'Saluran Dengan Pasangan Batu Belah	303,39 M	Pokir
	41	KP. CIKOPO RT 04RW 08 DESA BUMIWANGI KECAMATAN CIPARAY, Kab. Bandung	#PK 'Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	42	KP. CIKOPO RT 04 RW 08 DESA BUMIWANGI KECAMATAN CIPARAY, Kab. Bandung	#PK Menara Besi Air 3M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	43	KP. CIKOPO RT 04 RW 08 DESA BUMIWANGI KECAMATAN CIPARAY, Kab. Bandung	#PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	44	Komp. KBSI RT03 Rw 08 Desa gunung leutik kecamatan ciparay, Kab. Bandung	#PK Jamban + Septic Tank Pabrikasi	2 Unit	Pokir
	45	Kp Pasir Gambir Rw 16 Ds Majalaya Kec Majalaya, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I	1 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	46	Kp Pasir gambir Rt 02 Rw 16 Ds Majalaya Kec Majalaya, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I	1 Unit	Pokir
	47	Kp Saparako Rt 01 Rw 04 Ds Majalaya Kec Majalaya, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I	1 Unit	Pokir
	48	kp awiligar rt 07 rw 010 kelurahan cibeunying kecamatan cimenyan, Kab. Bandung	#PK 'Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	49	Rt 04 Rw 06 desa Sukamulya,kec rancaekek, Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	165,82 M2	Pokir
	50	GSG RW.04 Kel.Rancaekek Kencana Kec.Rancaekek, Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	165,82 M2	Pokir
	51	Jl alamanda 1 sampai alamanda 2 RT 01 RW16 kelurahan rancaekek kencana kecamatan rancaekek, Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	165,82 M2	Pokir
	52	Jl. Bungur Rt 03 Rw16 Blok 16 kel.Rancaekek Kencana, Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	165,82 M2	Pokir
	53	Kp. Cihanjaro RT. 01/09 Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung , Kab. Bandung	#PK Penataan TPU Tipe A	364,96 M2	Pokir
	54	Jl. Permata alam RT 001 RW 008 Ds. Buahbatu Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	163,28 M2	Pokir
	55	Komp. GBI RT 004 RW 010 Ds. Buahbatu Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	163,28 M2	Pokir
	56	Komp. GBI RT 003 RW 010 Ds. Buahbatu Kec. Bojogsoang, Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	163,28 M2	Pokir
	57	Jl. Anggrek I RT 008 RW 029 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi , Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	163,28 M2	Pokir
	58	Komp. Manglayang Regency RW 026 Ds. Cimekar Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	163,28 M2	Pokir
	59	NYALINDUNG RT.3 RW.1 DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	60	PASIRKAWUNG RT.6 RW.6 DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	61	Komp. Bumi Harapan Cibiru, RW. 09 Desa Cibiruhilir Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah Dengan Greffel 1/2 Dia 20 Cm Tanpa Tulangan	271,42 M	Pokir
	62	Komp. Bumi Harapan Cibiru RW. 16 Desa Cibiruhilir Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK 'Saluran Dengan Pasangan Batu Belah Dengan Greffel 1/2 Dia 20 Cm Tanpa Tulangan	320 M	Pokir
	63	Komp. Permata Biru RW. 24 Desa Cinunuk Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pasangan Batu Belah Dengan Greffel 1/2 Dia 20 Cm Tanpa Tulangan	320 M	Pokir
	64	Komp. Bumi Harapan Cibiru, RT. 01-02 RW. 09 Desa Cibiruhilir Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Penataan Taman Tipe A	196,65 M2	Pokir
	65	KP RANCAKENDAL DESA TANGSI MEKAR KECAMATAN PASEH, Kab. Bandung	#PK 'Sumur Dangkal 70M	1 Unit	Pokir
	66	rw 12 desa cangkuang wetan, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe I	1 Unit	Pokir
	67	Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	68	Kp lamajang Desa Lamajang Kec Pangalengan, Kab. Bandung	#PK Mck + Septik Tank Pabrikasi Tipe Ii	1 Unit	Pokir
	69	Kp Pangauban Desa Pangauban Kec Pacet, Kab. Bandung	#PK Jamban + Septic Tank Pabrikasi	1 Unit	Pokir
	70	Gedung Posyandu, Kp Budiasih Rt 1 Rw 16 Desa Gunungleutik Kec	#PK Jamban + Septic Tank Pabrikasi	3 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ciparay, Kab. Bandung			
	71	RW 03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari , Kab. Bandung	#PK Menara Besi Air 4M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	72	Kp. Sindangsari RW. 21 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	73	Kp. Kara RW. 02 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	74	Kp. Ciodeng RT. 02 RW. 08 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	75	Griya Delima RT. 06 RW. 06 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	76	Kp Babakan Peuteuy RW 12 Desa Babakan peuteuy Kec Cicalengka, Kab. Bandung	#PK 'Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	77	RW 01 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 70M	1 Unit	Pokir
	78	RW 04 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK 'Sumur Dangkal 70M	1 Unit	Pokir
	79	Cibedug Girang RT 01 RW 02 Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	80	Cicukang RT 01 RW 16 Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	81	RW 03 Desa Lebakwangi Kec Arjasari, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	82	KP Kebon Kapas kulon Rt 01 Rw 07 Desa Waluya kec Cicalengka , Kab. Bandung	#PK 'Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	83	RW 01 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	84	RW 04 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung	#PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	85	halaman Mesjid Kp.Katapang RT 03 RW 07 Desa Katapang Kec.Katapang, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	86	halaman Madrasah Ai-Qoyyum RT 02 RW 10 Desa Katapang Kec.Katapang, , Kab. Bandung	#PK 'Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	87	Kp Sukaluyu RT 04 RW 12 Desa Cangkuang Wetan Kec.Dayeuhkolot, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	88	kp.babakan rt 06 rw 18 desa mekarrahyu kec.marga asih, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	89	Halaman Majlis Taklim Turaes 4,Kp.Cipongporang RT 02 RW 11 Desa Katapang Kec.Katapang, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8	246,26368 M	Pokir
	90	Kp jatimekar rt/rw 02/06 desa bojongmalaka, Kec Baleendah, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	91	Kp. Pamuncatan RT 004 RW 006 Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	92	Kp. Cikurutug RT 001 RW 012 Desa Cicalengka Wetan, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	93	Kp. Kebon Suuk RT 002 RW 007 Desa Cicalengka Wetan, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	94	Kp. Kaca Kaca RT 003 RW 015 Desa Cicalengka Wetan, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir
	95	Kp Kiarapayung 01/08 Desa Cikawao Kec. Pacet, Kab. Bandung	#PK 'Sumur Dangkal 60M	1 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	96	KP BETAH TONGGOH RW.14 DESA NAGRAK, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 70M	1 Unit	Pokir
	97	Kp. Rancasaar RT001/012 Desa Wangisagara Kecamatan majalaya, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	98	kp. Simpang RT 001 /001 Desa Wangisagara Kecamatan majalaya, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	99	Kp. Kebontiwu RW 001/001, Kab. Bandung	#PK 'Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	100	Kp. Rajadesa RT 003/016 Desa Cipaku kecamatan Paseh, Kab. Bandung	#PK Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir
	101	Komp. GBI RT 004 RW 010 Ds. Buahbatu Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	#PK Saluran Dengan Pipa Pvc Khusus Pembuangan Dia 8 *	320 M	Pokir
	102	Kp. Pinggirsari RT 01 Rw 10 Desa Cihawuk Kec. Kertasari	#PK Menara Besi Air 4M Untuk Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	103	Kp. Pinggirsari RT 01 Rw 10 Desa Cihawuk Kec. Kertasari	#PK 'Tangki Air Kap.2000 Lt	1 Unit	Pokir
	104	Kp. Pinggirsari RT 01 Rw 10 Desa Cihawuk Kec. Kertasari	#PK 'Sumur Dangkal 80M	1 Unit	Pokir

DISPERKIMTAN

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Renja Disperkimtan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Oleh karenanya, dalam penyusunan Renja Disperkimtan diperlukan telaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya baik dalam lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten seperti RPJPN, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Bandung, RPJM Kabupaten Bandung, serta RKPD Kabupaten Bandung.

3.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 merupakan tahapan transisi dari selesainya periode pembangunan RPJPN 2005 – 2025 serta dimulainya periode pembangunan RPJPN 2025 – 2045. Pembangunan nasional tahun 2025 hingga 20 tahun ke depan perlu menggunakan paradigma baru dimana reformasi harus dilakukan bersamaan dengan transformasi secara menyeluruh berdasarkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur diterjemahkan dalam Visi RPJPN 2025 – 2045 sebagai Visi Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritime; perkembangan megatrend global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam 5 (lima) sasaran misi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan, diantaranya yaitu: pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *zero net emission*.

Guna mencapai Visi Indonesia Emas 2025 – 2045, maka dicanangkan 8 (delapan) agenda pembangunan, yaitu 1) Transformasi Sosial, 2) Transformasi Ekonomi, 3) Transformasi Tata Kelola, 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta

8) Kesinambungan Pembangunan. Upaya pencapaian target pembangunan ini harus dilaksanakan hingga level pemerintahan paling kecil dimana penyusunan rencana kerja lima tahunan maupun tahunan harus sesuai dengan garis besar RPJPN.

3.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman di Provinsi Jawa Barat, terdapat 2 (dua) pijakan yang menjadi landasan utama, yaitu: arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029. Secara umum, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman (*core business*) Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, diantaranya:

1. Mengurangi luasan permukiman kumuh
2. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni
3. Membantu penyediaan hunian layak bagi buruh, mahasiswa, santri, dan sektor informal
4. Mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang handal
5. Memfasilitasi peningkatan daya beli, cicil, dan sewa MBR terhadap hunian layak
6. Memfasilitasi pengadaan tanah yang tertib dan sesuai dengan tata ruang serta kepastian hukum

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dalam periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
A	**Meningkatnya pembentukan kawasan perkotaan dan perdesaan yang nyaman, layak, maju, insklusif dan berkelanjutan**		**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjnagkau dan Berkelanjutan**
1		Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memenuhi Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung
2		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Memenuhi Standar Kelayakan Kawasan Strategis dan Tematik
			Persentase Inftrastruktur terbangun di Kawasan Strategis Provinsi
3		Meningkatnya Kuliatas Perumahan	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah yang memenuhi Sayarat Krtahanan Bangunan
4		Tata Kelola Pertanahan tertib	Tingkat tertib tata kelola Pertanahan
5		Berkurangnya Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja
B	**Meningkatnya Kualiatas Infrastrukstur Wilayah**		**Indeks Kualitas Infrastruktur**
1		Meningkatnya Akses Infrastrukstur dasar Permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak
			Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman
			Akses Rumah Tangga Perkotaan Akses Air Minum Layak dan Aman
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum layak
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah

Sumber: Renstra Disperkim Tahun 2025 - 2029

3.1.3 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” dengan lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam hal ini, DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung mendukung capaian misi ke empat yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastuktur yang Terintegrasi”, dengan tujuan “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan”, indikator kinerja utama “Indeks Pengembangan Wilayah”, dengan sasaran “Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif”, dan indikator sasaran “Indeks Kualitas Infrastruktur”.

Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini:

Tabel III.2 Cascading Misi Pembangunan Keempat

Misi 4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastuktur yang Terintegrasi	
Tujuan	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan	
Indikator Tujuan	Indeks Pengembangan Wilayah	
Sasaran	Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif	
Indikator Sasaran	Indeks Kualitas Infrastruktur	
Program Prioritas	Program Pengembangan Perumahan	Program Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Sumber: Hasil Analisis Disperkimtan, 2025

Untuk dapat mendukung capaian dari cascading kinerja pada misi empat tersebut maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah "Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan" sedangkan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah "Indeks tertib administrasi pertanahan". Pencapaian IKD tersebut didukung oleh program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra DISPERKIMTAN Kabupaten Bandung.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten berfungsi sebagai arah dan pedoman utama untuk mengoordinasikan serta mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan fokus dan prioritas yang jelas bagi setiap unit kerja dan memastikan semua sumber daya yang dimiliki Dinas diarahkan secara efektif untuk mencapai hasil yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, tujuan jangka menengah berperan sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, memastikan konsistensi dengan kebijakan nasional dan daerah, serta mendorong terciptanya kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menetapkan tujuan yang terukur dan realistis, dinas dapat

menjawab tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang strategis yang ada untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Untuk mendorong pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, maka tujuan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 adalah:

"***Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.***"

Dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung tahun 2025 – 2029, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas serta profil pelayanan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung antara lain:

1. **Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau**

   Sasaran ini bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah (MBR), dapat mengakses perumahan yang layak, aman, dan sesuai standar kualitas dengan harga yang terjangkau. Hal ini mencakup penyediaan hunian bersubsidi, pembiayaan perumahan yang lebih inklusif, serta penyediaan insentif bagi pengembang untuk membangun perumahan bagi masyarakat kelas bawah. Sasaran ini juga melibatkan peningkatan aksesibilitas terhadap informasi terkait program perumahan dan kebijakan pendukung.

2. **Mengurangi luas kawasan kumuh**

   Sasaran ini bertujuan untuk merencanakan, menata, dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang tidak layak huni menjadi lingkungan yang sehat dan teratur. Sasaran ini akan fokus pada rehabilitasi kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengembangan fasilitas sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat..

3. **Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar**

   Sasaran ini berfokus pada penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat di kawasan permukiman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang nyaman dan layak huni. Penyediaan PSU dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak – anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, pemeliharaan dan modernisasi PSU diarahkan agar lebih efisien, tahan lama, ramah lingkungan, serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

4. **Menciptakan pengelolaan tanah yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan**

   Sasaran ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya, meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, serta mengurangi konflik agraria. Dengan pengelolaan tanah yang lebih optimal, diharapkan pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, dan redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan dapat terlaksana secara adil.

Guna memastikan pencapaian tujuan dan sasaran secara terukur dan efektif, maka diperlukan sebuah alat ukur untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sekaligus untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sejalan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan. Dalam konteks Renstra, alat ukur ini disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK tidak hanya menjadi acuan dalam pelaporan kinerja, tetapi juga sebagai dasar evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan. Penyusunan IKU harus memperhatikan pendekatan SMART dimana indikator yang disusun harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant,* dan *time – bound*. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:

Tabel III.3 Tujuan, Sasaran, dan Target Disperkimtan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Realisasi 2024	Target 2025
Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah		Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	52,28	52,4
		Indeks tertib administrasi pertanahan	34,16	34,58
	Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	60,67	67,92
	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,14	0,12
	Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	21,58	23
	Menciptakan	Persentase	23,96	33,55

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Realisasi 2024	Target 2025
	pengelolaan tanah Pemda yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan	bidang tanah Pemda yang telah terkelola		

Sumber: Renstra Disperkimtan Tahun 2025 - 2029

3.3 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Kebijakan operasional yang mendukung perwujudan visi dan misi Disperkimtan dalam Rencana Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2025 direalisasikan melalui perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mempertimbangkan beberapa hal antara lain: pencapaian tujuan dan sasaran Disperkimtan tahun 2024, pencapaian IKU Disperkimtan tahun 2024, prioritas pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta kebijakan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pada tahun anggaran 2025, Disperkimtan memiliki 8 program, 16 kegiatan, dan 44 sub kegiatan yang terbagi pada:

a. Urusan Rutin terdiri dari 1 program, 6 kegiatan, dan 19 sub kegiatan
b. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 4 program, 7 kegiatan, dan 20 sub kegiatan
c. Urusan Pertanahan terdiri dari 3 program, 3 kegiatan, dan 5 sub kegiatan
d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
1	**Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- NILAI AKIP - NILAI BMD**		
1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	
1.1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
1.1.4	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
1.1.5	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.1.6	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
1.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	
1.2.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
1.3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	
1.3.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1.3.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1.3.3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
1.3.4	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
1.3.5	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
1.3.6	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
1.3.7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.3.8	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
1.4.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
1.4.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
1.5	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	
1.5.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
1.5.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1.5.3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1.6	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	
1.6.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2	**Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum**	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG**		

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
2.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program**	
2.1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**		**Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni**	
2.2.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun
2.2.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
2.3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**		**A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan** **B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan**	
2.3.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
			Perumahan			
2.3.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara
3	**Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum**	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**		
3.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan**	
3.1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
4	**Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum**	**Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**PERSENTASE SISA LUAS KAWASAN KUMUH**		

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
4.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	
4.1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi
4.1.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina
4.1.3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
4.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**Persentase luas kawasan kumuh**	
4.2.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
4.2.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
4.2.3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya kualitas lingkungan Permukiman	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi
5	**Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum**	**Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU**		
5.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**		**Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU**	
5.1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
5.1.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
5.1.3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman
5.1.4	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
5.1.5	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
5.1.6	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan
5.1.7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
5.1.8	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya Akses terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
6	**Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum**	**Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**PERSENTASE PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		
6.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi**	
6.1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.1.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
7	**Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum**	**Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN**		
7.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform**	
7.1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
8	**Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum**	**Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA**		
8.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun**	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator		
				Outcome Ultimate	Outcome Intermediate	Output
8.1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
8.1.2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah, perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana dan Utilitas umum	Meningkatnya tertib administrasi dan tata kelola pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota

DISPERKIMTAN

Untuk Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disajikan dalam Tabel III.3 (T-C.33) tentang Rumusan Rencana Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung (*tabel terlampir*).

DISPERKIMTAN

Tabel III.5 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- NILAI AKIP - NILAI BMD**	**Kab. Bandung**	**A (84,30)**	**22.290.767.311,00**	**APBD**	**PD**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**Kab. Bandung**	**100,00%**	**295.360.580,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	2 dokumen	44.141.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	2 dokumen	4.300.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	2 Dokumen	3.010.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	2 Laporan	106.000.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	2 Dokumen	96.000.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung	5 Data	41.909.580,00	APBD	PD
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**Kab. Bandung**	**100%**	**15.864.796.801,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	79 orang / bulan	15.864.796.801,00	APBD	PD
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**Kab. Bandung**	**100,00%**	**832.754.240,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	9.998.900,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	235.335.200,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	9.994.900,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	61.371.140,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	8 Dokumen	86.200.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Bandung	5 Paket	308.715.100,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	20 Laporan	18.900.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	50 Laporan	102.239.000,00	APBD	PD
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bandung**	**100%**	**4.840.220.440,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	84.781.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	4.755.439.440,00	APBD	PD
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**Kab. Bandung**	**100%**	**408.510.250,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	84 unit	249.512.250,00	APBD	PD
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bandung	7 Unit	109.000.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 unit	49.998.000,00	APBD	PD
1	**04**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Bandung**	**100%**	**49.125.000,00**	**APBD**	**PD**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	04	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung	2 Orang/Bulan	49.125.000,00	APBD	PD
								JUMLAH I	**22.290.767.311,00**		PD
1	**04**	**02**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**Kab. Bandung**			**APBD**	**PD**
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG**	**Kab. Bandung**	**67,92%**	**2.335.226.681,00**	**APBD**	**PD**
1	**04**	**02**	**2.3**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program**	**Kab. Bandung**	**100%**	**1.679.725.000,00**	**APBD**	**PD**
1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	3 Unit Rumah	1.679.725.000,00	APBD	PD
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni**	**Kab. Bandung**	**100%**	**515.204.681,00**	**APBD**	**PD**
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kab. Bandung	3 Laporan	431.753.500,00	APBD	PD
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bandung	1 dokumen	83.451.181,00	APBD	PD
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan**	**Kab. Bandung**	**100%**	**140.297.000,00**	**APBD**	**PD**
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bandung	1 Laporan	63.602.000,00	APBD	PD
1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Kab. Bandung	1 Sistem Informasi	76.695.000,00	APBD	PD
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**	**Kab. Bandung**	**95,53%**	**52.524.733.940,00**	**APBD**	**PD**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan**	**Kab. Bandung**	**100%**	**52.524.733.940,00**	**APBD**	**PD**
1	04	4	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Kab. Bandung	715 Unit Rumah	52.524.733.940,00	APBD	**1. PD : Rp.19.475.230.660,00 2.Pokir : Rp.33.049.503.280,00**
1	**04**	**03**	**2.03**		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH**	**Kab. Bandung**	**0,12%**	**5.873.708.400,00**	**APBD**	**PD**
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**Kab. Bandung**	**100%**	**784.349.100,00**	**APBD**	**PD**
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Kab. Bandung	5 Dokumen	550.000.000,00	APBD	PD
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kab. Bandung	10 Kelompok Masyarakat	84.349.100,00	APBD	PD
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Bandung	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD	PD
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase luas kawasan kumuh**	**Kab. Bandung**	**100%**	**5.089.359.300,00**	**APBD**	**PD**
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bandung	200 Laporan	84.701.750,00	APBD	PD
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kab. Bandung	2 Dokumen	289.750.050,00	APBD	PD
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kab. Bandung	7 Ha	4.714.907.500,00	APBD	PD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU**	**Kab. Bandung**	**23,00%**	**21.045.494.813,00**	**APBD**	**PD**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU**	**Kab. Bandung**	**100%**	**21.045.494.813,00**	**APBD**	**PD**
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Bandung	2 Dokumen	411.005.000,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Bandung	95 Lokasi	11.831.548.500,00	APBD	**1.PD : Rp.684.961.890,00 2. Pokir : Rp.11.146.586.610,00**
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman	Kab. Bandung	4 Laporan	544.485.000,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0006	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Bandung	4 Dokumen	179.589.500,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0007	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kab. Bandung	24 Kelompok	8.061.263,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Kab. Bandung	24 Lokasi	6.565.401.000,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0009	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kab. Bandung	47 Lokasi	1.299.389.500,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0010	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Kab. Bandung	24 Dokumen	206.015.050,00	APBD	PD
2	**10**	**04**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**	**Kab. Bandung**	**42%**	**1.127.344.200,00**	**APBD**	**PD**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi**	**Kab. Bandung**	**100%**	**1.127.344.200,00**	**APBD**	**PD**
2	10	02	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	2 Berita Acara	275.022.340,00	APBD	PD
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	5 Dokumen	852.321.860,00	APBD	PD
2	**10**	**05**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN**	**Kab. Bandung**	**13,89%**	**89.140.000,00**	**APBD**	**PD**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform**	**Kab. Bandung**	**100%**	**89.140.000,00**	**APBD**	**PD**
2	10		2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	1 Dokumen	89.140.000,00	APBD	PD
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN**	**Kab. Bandung**	**21,67%**	**60.093.253.462,00**	**APBD**	**PD**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun**	**Kab. Bandung**	**100%**	**60.093.253.462,00**	**APBD**	**PD**
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	1 Laporan	59.959.109.962,00	APBD	PD
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	1 Dokumen	134.143.500,00	APBD	PD
								JUMLAH II	**143.088.901.496,00**		
								JUMLAH I + II	**165.379.668.807,00**		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tahun 2025 menjadi titik awal pelaksanaan arah kebijakan baru sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD baru, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tahunan, baik dari sisi substansi rencana kerja maupun kebijakan penganggaran. Proses penyesuaian tersebut dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 yang merespons dinamika pelaksanaan pembangunan, kemampuan fiskal, serta kebutuhan strategis daerah.

Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja, penajaman fokus pembangunan, serta keterbatasan fiskal yang mendorong efisiensi belanja. Perubahan dalam pendanaan juga dipengaruhi oleh adanya kebutuhan belanja wajib, seperti penyesuaian gaji dan tunjangan kinerja (Tukin) akibat pengangkatan CPNS dan PPPK baru, serta kebijakan refocussing yang diarahkan untuk mendukung belanja modal strategis.

Secara keseluruhan, total belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung mengalami penurunan signifikan. Pada DPA Murni Tahun 2025, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp220.007.773.130,88. Namun, melalui serangkaian tahapan penyesuaian, termasuk:

- Pengurangan melalui Parsial 1 sebesar Rp812.498.847,00,
- Penyesuaian pada tahap RANWAL RKPD-P sebesar Rp18.160.484.757,00,
- Penambahan untuk belanja pegawai (gaji & tukin) sebesar Rp1.696.379.280,12,
- Refocussing besar pada RANHIR RKPD-P sebesar Rp57.000.000.000,00,

dan hanya diimbangi oleh penambahan sebesar Rp19.648.500.000,00 untuk belanja modal strategis, maka total anggaran pada DPA Perubahan turun menjadi Rp165.379.668.807,00. Ini berarti terjadi penurunan sebesar Rp54.628.104.323,88 atau setara 24,8% dari pagu awal.

Kebijakan refocussing sebesar Rp57 miliar berdampak langsung terhadap pemangkasan program prioritas, seperti Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang semula direncanakan menyasar 2.260 unit, akhirnya hanya dapat direalisasikan untuk 715 unit. Selain itu, alokasi untuk kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga ditiadakan sebagai bagian dari efisiensi belanja, sehingga hanya usulan dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dapat diakomodasi dalam dokumen perubahan.

Sementara itu, belanja tambahan sebesar Rp19,6 miliar diarahkan untuk mendukung program strategis berupa:

- Pengadaan tanah untuk Kantor Kejaksaan Negeri,
- Penyusunan dokumen perencanaan dan perencanaan teknis untuk Kejaksaan dan RSUD Kertasari,
- Kegiatan appraisal lahan untuk RSUD, serta
- Perencanaan penggunaan tanah sebagai bagian dari penguatan aset daerah.

Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan pentingnya ketepatan arah kebijakan perencanaan dalam masa transisi RPJMD, dengan tetap menjaga fleksibilitas fiskal dan menjawab kebutuhan strategis daerah secara berkelanjutan. Secara rinci, tabel rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

DISPERKIMTAN

Tabel IV.1 (T-C.41) Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- NILAI AKIP - NILAI BMD**	**Kab. Bandung**	**A (83,50)**	**22.290.767.311,00**	**APBD**	**PD**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**Kab. Bandung**	**100,00%**	**295.360.580,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bandung	2 dokumen	44.141.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bandung	2 dokumen	4.300.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bandung	2 Dokumen	3.010.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bandung	2 Laporan	106.000.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bandung	2 Dokumen	96.000.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Bandung	5 Data	41.909.580,00	APBD	PD
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**Kab. Bandung**	**100%**	**15.864.796.801,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bandung	79 orang / bulan	15.864.796.801,00	APBD	PD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**Kab. Bandung**	**100,00%**	**832.754.240,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	9.998.900,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	235.335.200,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	9.994.900,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bandung	1 Paket	61.371.140,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bandung	8 Dokumen	86.200.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Bandung	5 Paket	308.715.100,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bandung	20 Laporan	18.900.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bandung	50 Laporan	102.239.000,00	APBD	PD
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bandung**	**100%**	**4.840.220.440,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	84.781.000,00	APBD	PD
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bandung	12 Laporan	4.755.439.440,00	APBD	PD
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**	**Kab. Bandung**	**100%**	**408.510.250,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bandung	84 unit	249.512.250,00	APBD	PD
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Kab.	7 Unit	109.000.000,00	APBD	PD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
						Lainnya yang Dipelihara	Bandung				
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bandung	1 unit	49.998.000,00	APBD	PD
1	**04**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kab. Bandung**	**100%**	**49.125.000,00**	**APBD**	**PD**
1	04	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bandung	2 Orang/Bulan	49.125.000,00	APBD	PD
								JUMLAH I	**22.290.767.311,00**		PD
1	**04**	**02**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		**Kab. Bandung**			**APBD**	**PD**
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG**	**Kab. Bandung**	**100,00%**	**2.335.226.681,00**	**APBD**	**PD**
1	**04**	**02**	**2.3**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program**	**Kab. Bandung**	**100%**	**1.679.725.000,00**	**APBD**	**PD**
1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	3 Unit Rumah	1.679.725.000,00	APBD	PD
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terhuni**	**Kab. Bandung**	**100%**	**515.204.681,00**	**APBD**	**PD**
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kab. Bandung	3 Laporan	431.753.500,00	APBD	PD
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Bandung	1 dokumen	83.451.181,00	APBD	PD
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan** **B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan**	**Kab. Bandung**	**100%**	**140.297.000,00**	**APBD**	**PD**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Bandung	1 Laporan	63.602.000,00	APBD	PD
1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Kab. Bandung	Sistem Informasi	76.695.000,00	APBD	PD
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**	**Kab. Bandung**	**100,00**	**52.524.733.940,00**	**APBD**	**PD**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan**	**Kab. Bandung**	**100%**	**52.524.733.940,00**	**APBD**	**PD**
1	04	4	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	Kab. Bandung	715 Unit Rumah	52.524.733.940,00	APBD	**1. PD : Rp.19.475.230.660,00 2.Pokir : Rp.33.049.503.280,00**
1	**04**	**03**	**2.03**		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH**	**Kab. Bandung**	**0,10%**	**5.873.708.400,00**	**APBD**	**PD**
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**Kab. Bandung**	**100%**	**784.349.100,00**	**APBD**	**PD**
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Kab. Bandung	5 Dokumen	550.000.000,00	APBD	PD
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kab. Bandung	10 Kelompok Masyarakat	84.349.100,00	APBD	PD
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Bandung	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD	PD
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Persentase luas kawasan kumuh**	**Kab. Bandung**	**100%**	**5.089.359.300,00**	**APBD**	**PD**
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Kab.	200 Laporan	84.701.750,00	APBD	PD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Bandung				
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kab. Bandung	2 Dokumen	289.750.050,00	APBD	PD
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kab. Bandung	7 Ha	4.714.907.500,00	APBD	PD
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU**	**Kab. Bandung**	**23,00%**	**21.045.494.813,00**	**APBD**	**PD**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU**	**Kab. Bandung**	**100%**	**21.045.494.813,00**	**APBD**	**PD**
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Bandung	2 Dokumen	411.005.000,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Bandung	95 Lokasi	11.831.548.500,00	APBD	**1.PD : Rp.684.961.890,00 2. Pokir : Rp.11.146.586.610,00**
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman	Kab. Bandung	4 Laporan	544.485.000,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kab. Bandung	24 Kelompok	8.061.263,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Kab. Bandung	24 Lokasi	6.565.401.000,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kab. Bandung	47 Lokasi	1.299.389.500,00	APBD	PD
1	04	05	2.01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Kab. Bandung	24 Dokumen	206.015.050,00	APBD	PD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Bandung	4 Dokumen	179.589.500,00	APBD	PD
2	**10**	**04**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH**	**Kab. Bandung**	**75%**	**1.127.344.200,00**	**APBD**	**PD**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi**	**Kab. Bandung**	**100%**	**1.127.344.200,00**	**APBD**	**PD**
2	10	02	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	2 Berita Acara	275.022.340,00	APBD	PD
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	5 Dokumen	852.321.860,00	APBD	PD
2	**10**	**05**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN**	**Kab. Bandung**	**20,00%**	**89.140.000,00**	**APBD**	**PD**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform**	**Kab. Bandung**	**100%**	**89.140.000,00**	**APBD**	**PD**
2	10		2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	1 Dokumen	89.140.000,00	APBD	PD
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG DIMANFAATKAN PERSENTASE LUAS TANAH YANG TERKELOLA**	**Kab. Bandung**	**20%**	**60.093.253.462,00**	**APBD**	**PD**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun**	**Kab. Bandung**	**100%**	**60.093.253.462,00**	**APBD**	**PD**
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	1 Laporan	59.959.109.962,00	APBD	PD
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bandung	1 Dokumen	134.143.500,00	APBD	PD
								JUMLAH II	**143.088.901.496,00**		
								JUMLAH I + II	**165.379.668.807,00**		

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap penyesuaian dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, serta merupakan bagian dari strategi pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029. Perubahan ini menjadi penting dalam memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan tetap selaras dengan dinamika fiskal, perubahan prioritas, serta kebutuhan aktual di lapangan.

Tahun 2025 membawa arah pembangunan baru yang berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor hunian layak, penataan kawasan, pemenuhan sarana-prasarana dasar, dan pengelolaan pertanahan. Sejalan dengan Renstra Disperkimtan 2025–2029, tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah:

"Terwujudnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah."

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan empat sasaran strategis yang menjadi pijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan akses terhadap hunian layak dan terjangkau,
2. Mengurangi luas kawasan kumuh,
3. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai dan sesuai standar,
4. Menciptakan pengelolaan tanah yang lebih optimal, tertata, dan berkeadilan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyediaan dan penataan infrastruktur dasar baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, Disperkimtan dituntut untuk bekerja secara lebih adaptif, akuntabel, dan kolaboratif. Program prioritas seperti penanganan rumah tidak layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan PSU, serta penataan aset tanah memerlukan penanganan lintas sektor dan dukungan dari berbagai sumber pendanaan, termasuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, pendampingan dan kesiapan teknis terhadap program-program tersebut harus menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Perubahan Renja ini juga mencerminkan pentingnya optimalisasi struktur organisasi, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pemenuhan kebutuhan tenaga teknis yang relevan dengan fungsi-fungsi layanan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan program akan lebih terjamin, dan target pembangunan infrastruktur dasar permukiman dapat lebih cepat tercapai.

Pada akhirnya, dokumen Perubahan Renja ini tidak hanya menjadi alat perencanaan teknokratis, tetapi juga merupakan komitmen Disperkimtan dalam menyukseskan arah pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.

Soreang, 20 Juni 2025

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

TTD

WAHYUDIN

BUPATI BANDUNG

TTD

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA